

RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT JENDERAL
2015-2019



PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
NOMOR 131.1/SJ-IND/PER/4/2015

TENTANG

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31.1/M-IND/PER/3/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disebut Renstra Sekjen Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019.
- (2) Renstra Sekjen Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal 2

Renstra Sekjen Tahun 2015-2019 berisi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, program, kegiatan, indikator kinerja, target kinerja dan pendanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019.

Pasal 3

Unit Kerja Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian wajib menyusun rencana strategis unit kerjanya dengan berpedoman pada:

- a. Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019; dan
- b. Renstra Sekjen Tahun 2015-2019.

Pasal 4

Rencana strategis unit kerja eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disampaikan kepada Sekretaris Jenderal untuk ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Sekretaris Jenderal ini ditetapkan.

Pasal 5

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 berlaku secara *mutatis mutandis* bagi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri, Pusat Data dan Informasi, dan Pusat Komunikasi Publik.

Pasal 6

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2015

Plt. SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,



SYARIF HIDAYAT

SALINAN Keputusan Sekretaris Jenderal ini
disampaikan kepada:

1. Menteri Perindustrian;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian;
4. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian;
5. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri;
6. Kepala Pusat Data dan Informasi;
7. Bendahara Pengeluaran;
8. Peringgal.

LAMPIRAN PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN

NOMOR :131.1/SJ-IND/PER/4/2015

TANGGAL :27 April 2015

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2015 – 2019

- BAB I PENDAHULUAN
 - I.1 KONDISI UMUM
 - I.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN
- BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL
 - II.1 VISI
 - II.2 MISI
 - II.3 TUJUAN
 - II.4 SASARAN
- BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
 - III.1 ARAH KEBIJAKAN
 - III.2 STRATEGI
 - III.3 PROGRAM
 - III.4 KEGIATAN
 - III.5 TARGET JANGKA MENENGAH (2015-2019)
 - III.6 KERANGKA REGULASI
 - III.7 KERANGKA KELEMBAGAAN
- BAB IV TARGET KINERJA DAN PENDANAAN
 - IV.1 TARGET KINERJA
 - IV.2 KERANGKA PENDANAAN
- BAB V PENUTUP

- LAMPIRAN 1 : CAPAIAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL
TAHUN 2010-2014
- LAMPIRAN 2 : PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT
JENDERAL
- LAMPIRAN 3 : MATRIKS TARGET KINERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT
JENDERAL TAHUN 2015-2019

Pt. SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,



SYARIF HIDAYAT

KATA PENGANTAR

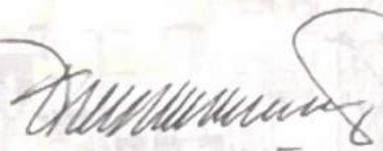
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan dan acuan penganggaran yang berorientasi pada hasil yang dicapai untuk kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2015-2019. Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal.

Renstra sekretariat Jenderal ini disusun dengan mengacu dan sejalan dengan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perindustrian 2015-2019 sebagaimana tertuang dalam Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2015 - 2019 dan telah ditetapkan dengan Permenperin No. 31.1 / M-IND / PER / 3 / 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019. Selanjutnya dokumen Renstra ini menjadi acuan seluruh Unit Eselon II dan Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal dalam rangka meningkatkan kinerjanya dalam mencapai sasaran dan target yang harus dicapai pada kurun waktu 2015-2019.

Akhirnya, dengan segala upaya dari seluruh jajaran Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian, kami berharap agar seluruh sasaran dan target sebagaimana ditetapkan dalam Renstra ini dapat diimplementasikan dalam rangka mendukung program Kementerian Perindustrian dan mensukseskan Pembangunan Nasional.

Jakarta, April 2015
Plt. Sekretaris Jenderal



Syarif Hidayat

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Kondisi Umum	1
I.2 Potensi Dan Permasalahan	7
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN SEKRETARIAT JENDERAL	9
II.1 Visi	9
II.2 Misi	9
II.3 Tujuan	10
II.4 Sasaran	10
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN SEKRETARIAT JENDERAL	13
III.1 Arah Kebijakan Sekretariat Jenderal	13
III.2 Strategi Sekretariat Jenderal	13
III.3 Program	14
III.4 Kegiatan	14
III.5 Target Jangka Menengah (2015-2019)	14
III.6 Kerangka Regulasi	16
III.7 Kerangka Kelembagaan	23
BAB IV TARGET KINERJA DAN PENDANAAN	32
IV.1 Target Kinerja	32
IV.2 Target Pendanaan	43
BAB V PENUTUP	45

LAMPIRAN :

Lampiran 1 : Capaian Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2010-2014

Lampiran 2 : Peta Strategi Dan Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal

Lampiran 3 : Matriks Target Kinerja dan Pendanaan Sekretariat Jenderal Tahun 2015-2019

DAFTAR TABEL

Tabel III.1	Matriks Kerangka Regulasi Sekretariat Jenderal	17
Tabel IV.1	Sasaran dan Indikator Kinerja Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian Tahun 2015 - 2019	32
Tabel IV.2	Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian serta Koordinasi Tahun 2015 – 2019	34
Tabel IV.3	Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Manajemen ASN Tahun 2015 – 2019	35
Tabel IV.4	Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan dan BMN Tahun 2015 – 2019	35
Tabel IV.5	Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Pelayanan Hukum dan Organisasi Tahun 2015 – 2019	36
Tabel IV.6	Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Manajemen Perkantoran Berbasis Teknologi Tahun 2015 – 2019	37
Tabel IV.7	Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2015 – 2019	38
Tabel IV.8	Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi dan Handal Tahun 2015 – 2019	40
Tabel IV.9	Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Komunikasi dan Informasi Publik Tahun 2015 – 2019	41
Tabel IV.10	Sasaran dan Indikator Kinerja Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Kementerian Perindustrian Tahun 2015 - 2019	42
Tabel IV.11	Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan, dan Peningkatan Sarana dan Prasarana kerja Tahun 2015 – 2019	43
Tabel IV.12	Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Sekretariat Jenderal Tahun 2015 – 2019	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Peta Strategi Sekretariat Jenderal	12
Gambar III.1	Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Saat Ini	27
Gambar III.2	Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Yang Dibutuhkan	29



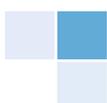
1. PENDAHULUAN

I.1 KONDISI UMUM

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian, Kementerian Perindustrian mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas tersebut, Kementerian Perindustrian memiliki unit organisasi Sekretariat Jenderal yang bertugas untuk menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan 7 (tujuh) fungsi yaitu:

1. Koordinasi kegiatan Kementerian Perindustrian;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Perindustrian;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Perindustrian;
4. Pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana;
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Perindustrian.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31.1/M-IND/PER/3/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian, Sekretariat Jenderal perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 5 (lima) tahunan yaitu tahun 2015 – 2019 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja serta kerangka pendanaan Sekretariat Jenderal. Renstra tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi seluruh unit organisasi di bawah Sekretariat Jenderal



dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berdasarkan Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2010 – 2014, Sekretariat Jenderal mempunyai visi Mewujudkan *Pelayanan Prima kepada Stakeholders* dengan misi *Melayani Stakeholders secara Profesional dan Pro Bisnis* serta *Menyelenggarakan Tata Pemerintahan yang Baik dan Profesional*. Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Sekretariat Jenderal telah menetapkan beberapa sasaran strategis yang pencapaiannya dilakukan melalui pelaksanaan 2 (dua) program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian Perindustrian dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Berikut ini hasil evaluasi secara umum terhadap pelaksanaan program yang dilaksanakan Sekretariat Jenderal selama periode tahun 2010 – 2014.

A. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perindustrian dalam hal persiapan internal dengan indikator keberhasilan pelaksanaan program sebagai berikut:

- a. Terkoordinasinya pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- b. Terbinanya pelaksanaan tugas Kementerian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya serta penghubung antar lembaga dan masyarakat;
- c. Terlaksananya pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian Perindustrian terdiri dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing unit organisasi eselon II di bawah Sekretariat Jenderal dengan hasil kegiatan/output sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan

Kegiatan Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dengan keluaran/output yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas perencanaan dengan indikator keberhasilan yaitu: a) persentase maksimal anggaran yang diblokir (tanda bintang) dari Pagu Definitif Kementerian, dan b) persentase maksimal revisi DIPA dari Pagu Kementerian tahun berjalan. Berdasarkan hasil evaluasi Renstra Sekretariat Jenderal tahun 2010-2014, untuk indikator persentase maksimal anggaran yang diblokir (tanda bintang) dari Pagu Definitif Kementerian dan indikator persentase maksimal revisi DIPA dari Pagu Kementerian tahun berjalan pada tahun 2010 realisasinya sebesar 11.60% sehingga tercapai, sedangkan untuk tahun lainnya target tidak tercapai. Sedangkan untuk Persentase maksimal revisi DIPA dari Pagu Kementerian tahun berjalan hanya pada tahun 2012 saja yang tidak tercapai.

2. Pengembangan SDM Industri

Kegiatan Pengembangan SDM Industri dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian dengan keluaran/output yang diharapkan adalah peningkatan koordinasi, perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian, sistem informasi dan manajemen kinerja sumber daya manusia aparatur di lingkungan Kementerian Perindustrian. Berdasarkan hasil evaluasi Renstra Sekretariat Jenderal tahun 2010-2014, untuk indikator dokumen perencanaan SDM Aparatur tercapai setiap tahunnya dari tahun 2013 hingga 2014, dan indikator dokumen pengelolaan urusan kepegawaian tercapai setiap tahun, hanya pada tahun 2013, dari target 34 dokumen terealisasi 16 dokumen, sedangkan untuk indikator layanan manajemen kinerja tercapai setiap tahun, hanya pada tahun 2013, dari target 7 laporan terealisasi 6 laporan.

3. Meningkatkan Sistem Tata Kelola Keuangan

Kegiatan Meningkatkan Sistem Tata Kelola Keuangan dilaksanakan oleh Biro Keuangan dengan keluaran/output yang diharapkan adalah 1) Peningkatan pengelolaan keuangan dan BMN, serta predikat WTP bagi Kementerian Perindustrian terus bertahan dengan realisasi sebesar 100%, 2) Terbayarkannya Gaji, Honorarium dan Vakasi Pegawai dengan realisasi

sebesar 100%, 3) Pemutakhiran data barang milik negara yang paling mutakhir dengan realisasi sebesar 100%, 4) Mewujudkan Pelaksanaan anggaran yang tepat sasaran dan tepat waktu dengan realisasi sebesar 98,83%, serta 5) Peningkatan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf dengan realisasi sebesar 100%.

4. Pelaksanaan Ketatausahaan Pimpinan, Pelaksanaan Urusan Keprotokolan dan Keamanan Dalam, Tata Persuratan dan Kearsipan, dan Kerumah Tanggaan Kegiatan Pelaksanaan Ketatausahaan Pimpinan, Pelaksanaan Urusan Keprotokolan dan Keamanan Dalam, Tata Persuratan dan Kearsipan, dan Kerumah Tanggaan dilaksanakan oleh Biro Umum dengan indikator (a) Terselenggaranya layanan administrasi dan Ketatausahaan pimpinan dan Kementerian dengan pencapaian 98,22% (b) Terpeliharanya sarana dan prasarana kerja dengan pencapaian 100% (c) Terciptanya keamanan dan ketertiban lingkungan kantor dengan pencapaian 98,87%.
5. Peningkatan Kualitas Layanan di Bidang Hukum dan Organisasi Kegiatan Peningkatan Kualitas Layanan di Bidang Hukum dan Organisasi dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Organisasi dengan sasaran (i) Peningkatan Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang memiliki indikator (a) Jumlah Peraturan Perundang-undangan Bidang Industri dengan pencapaian 201,6% (b) Jumlah Kajian Hukum Bidang Industri dengan pencapaian 40% (ii) Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan memiliki indikator (a) Database Informasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Industri yang Up to Date dengan pencapaian 100% (b) Jumlah Peraturan Perundang-undangan Bidang Industri yang Dipublikasi dengan pencapaian 100% (iii) Peningkatan Kualitas Layanan dan Bantuan Hukum memiliki indikator (a) Jumlah Perkara Hukum yang Diadvokasi dengan pencapaian 100% (b) Jumlah Masalah Hukum yang disuluh dengan pencapaian 160% (iv) Peningkatan Koordinasi Penataan Organisasi dan Tata Laksana memiliki indikator (a) Jumlah Peraturan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian yang Efektif dan Efisien dengan pencapaian 100% (b) Jumlah Kajian Kinerja Organisasi Kementerian Perindustrian dengan pencapaian 37,50% (c) Persentase Unit Organisasi yang Menerapkan Budaya Kerja 5K

dengan pencapaian 110,67% (d) Persentase Unit Organisasi yang Menerapkan Sistem Manajemen Mutu Berbasis ISO 9001 – 2008 dengan pencapaian 31,76%.

6. Pembangunan Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi

Kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi dan Handal dilaksanakan oleh Pusat Data dan Informasi dengan sasaran Terlaksananya pembinaan sistem informasi, pengumpulan dan pengolahan data, sistem jaringan informasi dan pelayanan data/informasi industri memiliki indikator (a) jumlah data perusahaan dengan pencapaian 80% (b) jumlah produk yang telah terverifikasi (perusahaan) dengan pencapaian 134%.

7. Peningkatan Pengelolaan Publik

Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Publik dilaksanakan oleh Pusat Komunikasi Publik dengan sasaran Terlaksananya pencitraan, pengelolaan layanan publik, hubungan antar lembaga, publikasi dan penyebarluasan informasi kebijakan industri, ketatausahaan dan manajemen kinerja memiliki indikator (a) Jumlah pelayanan publik 23.500 orang dengan pencapaian 110,51% (b) Jumlah penyelenggaraan koordinasi lintas sektoral, lembaga tinggi negara dan sosialisasi kebijakan informasi sektor industri sebanyak 130 kali dengan pencapaian 123,08% (c) Jumlah informasi industri yang dipublikasikan 129.500 dengan pencapaian 116,48% (d) Jumlah pelayanan ketatausahaan dan manajemen kinerja 250 orang dengan pencapaian 87,20%.

8. Peningkatan Kualitas SDM Industri

Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Industri dengan sasaran (i) Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur dan SDM Industri memiliki indikator Jumlah SDM Aparatur dan SDM Industri telah mengikuti diklat sebanyak 14.330 orang dengan pencapaian 168,79% (ii) Meningkatnya Koordinasi dan fasilitasi pengembangan SDM Industri memiliki indikator 15 Koordinasi dan fasilitasi dengan pencapaian 106,67% (iii) Terciptanya SDM industri ahli madya sesuai dengan kebutuhan industri memiliki indikator Jumlah lulusan SDM ahli madya sebanyak 7.670 orang dengan pencapaian 128,44% (iv) Terciptanya SDM industri ahli siap kerja sesuai dengan kebutuhan industri dengan indikator Jumlah lulusan SDM terampil sebanyak 7150 orang dengan pencapaian 92,21% (v) Rintisan Gelar memiliki indikator (a) Jumlah Aparatur Perindustrian yang melaksanakan pendidikan S3

dengan pencapaian 97,50% (b) Jumlah Aparatur Perindustrian yang melaksanakan pendidikan S2 dengan pencapaian 98,13% (c) Jumlah Aparatur Perindustrian yang melaksanakan pendidikan S1 dengan pencapaian 100% (d) Jumlah SDM Industri yang mengikuti program TPL Beasiswa dengan pencapaian 100% (vi) Pendidikan kejuruan industri berbasis SBI dan kompetensi memiliki indikator (a) Terbentuknya LSP dan TUK dengan pencapaian 111,11% (b) Terwujudnya Workshop/Teaching Factory dengan pencapaian 111,11% (c) Terwujudnya sistem penyelenggaraan pendidikan berbasis SBI dengan pencapaian 100% (vii) Pendidikan tinggi industri berbasis spesialisasi dan kompetensi memiliki indikator (a) Terbentuknya LSP dan TUK dengan pencapaian 100% (b) Terwujudnya Workshop/ Teaching Factory dengan pencapaian 100% (c) Terwujudnya sistem penyelenggaraan pendidikan berbasis spesialisasi dengan pencapaian 100% (viii) Pengembangan BDI menjadi Pusat Pelatihan IKM sesuai Spesialisasi dan Kompetensinya memiliki indikator (a) Terbentuknya LSP dan TUK dengan pencapaian 114,29% (b) Terwujudnya Workshop/ Teaching Factory dengan pencapaian 114,29% (c) Terwujudnya sistem penyelenggaraan pendidikan berbasis spesialisasi dengan pencapaian 100% (ix) Fasilitasi pengembangan kompetensi SDM Industri memiliki indikator Jumlah SKKNI dengan pencapaian 150%.

B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan dalam bidang penyediaan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana yang diperlukan Kementerian Perindustrian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan nyaman bagi para pemangku kepentingan.

1. Kegiatan Pembangunan, pengadaan, perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana kerja dengan sasaran (i) Terkelolanya sarana prasarana kerja memiliki indikator Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai dengan pencapaian 98% (ii) Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja memiliki indikator Peningkatan sarana dan prasarana kerja dengan pencapaian 102%.

2. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan sasaran terlaksananya perencanaan, pengorganisasian, pembinaan, pengawasan serta evaluasi penggunaan kebutuhan tata kelola administrasi pengadaan barang dan jasa seluruh satuan organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian memiliki indikator Pelaksanaan Lelang sesuai dengan waktu yang direncanakan dengan pencapaian pada tahun 2014 sebesar 86,62%.

I.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. POTENSI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Jenderal memiliki beberapa potensi yang dapat mendukung keberhasilan untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran-sasaran strategisnya. Berikut ini hasil dari identifikasi terhadap potensi yang dimiliki Sekretariat Jenderal, antara lain:

1. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh aparatur Sekretariat Jenderal untuk mengembangkan dan meningkatkan sistem, standar, dan prosedur kerja guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Reformasi Birokrasi yang telah berjalan dan terus ditingkatkan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
3. Penyelenggaraan pemerintahan yang didukung oleh SDM yang handal dan profesional sehingga memiliki kapasitas untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan secara efektif dan efisien berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
4. Dalam melakukan pembinaan administrasi dan memberikan dukungan dalam penyelenggaraan tugas-tugas Kementerian Perindustrian, Sekretariat Jenderal telah melakukan penataan terhadap sarana dan prasarana fisik dan melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam hal ini aparatur yang handal dan sesuai dengan kebutuhan.
5. Adanya mekanisme dan prosedur kerja yang efektif dan efisien di lingkungan Sekretariat Jenderal.
6. Kualitas Laporan Keuangan yang mendapatkan capaian tertinggi (Opini WTP).

7. Pengembangan jaringan informasi dan website secara terpadu dan berkesinambungan.
8. Memiliki aplikasi-aplikasi yang merupakan pengembangan sistem kerja berbasis IT yang dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja di seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian.
9. Meningkatnya kualitas Lembaga Pendidikan dan Balai Diklat di Lingkungan Sekretariat Jenderal.
10. Adanya dasar hukum yang kuat yaitu UU No 25 Tahun 2009 untuk penyelenggaraan pelayanan publik dan UU 14 Tahun 2008 untuk keterbukaan informasi publik.

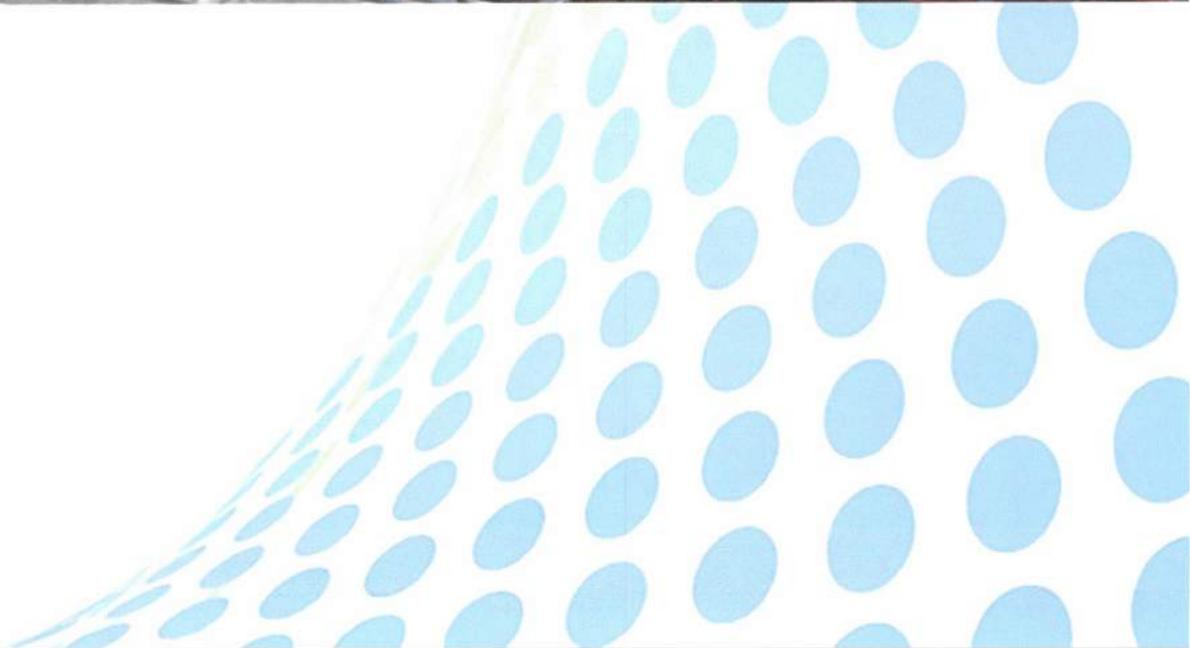
B. PERMASALAHAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Jenderal juga menghadapi beberapa permasalahan yang dapat menghambat keberhasilan untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran-sasaran strategisnya. Berikut ini hasil dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi Sekretariat Jenderal, antara lain:

1. Pola pengembangan karir masih belum berjalan sesuai dengan ketentuan.
2. Lemahnya pengendalian intern terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran sehingga pencapaian target belum optimal.
3. Struktur organisasi dan penetapan tugas dan fungsi yang kurang fleksibel dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan yang dihadapi.
4. Kualitas sistem dan prosedur tata kelola keuangan dan barang milik negara perlu ditingkatkan.
5. Sarana dan prasarana IT yang belum memenuhi kebutuhan kerja
6. Kualitas koordinasi dalam perencanaan dan pelaporan masih harus ditingkatkan.
7. Perlunya meningkatkan kualitas pengelolaan dan pembinaan komunikasi dan informasi publik.

A photograph of an industrial factory floor, possibly a steel mill, with various metal structures and machinery. A semi-transparent blue rectangular overlay is placed over the center of the image, containing the title text.

2. VISI, MISI DAN TUJUAN SEKRETARIAT JENDERAL



II.1 VISI

Berdasarkan kondisi umum, potensi dan permasalahan yang telah diuraikan pada Bab I serta tugas dan fungsi dari Sekretariat Jenderal, maka disusunlah visi dan misi Sekretariat Jenderal yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan, sasaran strategis, serta pelaksanaan program dan kegiatan. Visi Sekretariat Jenderal untuk tahun 2015 – 2019 adalah:

"Menjadi Unit Pendukung Pelaksanaan Tugas Kementerian Perindustrian Yang Profesional dan Berkualitas"

Berkualitas memiliki arti layanan, produk, dukungan administrasi yang dapat memenuhi harapan para stakeholders dengan didukung oleh SDM yang memiliki kompetensi tinggi dan produktif serta sarana dan prasarana kerja yang memadai.

II.2 MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal sebagai berikut:

"Mewujudkan tata laksana pemerintahan dan layanan yang terintegrasi, transparan, dan tepat waktu bagi para stakeholders"

Terintegrasi memiliki arti bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta memberikan layanan kepada seluruh stakeholders, sudah melalui sistem atau proses yang saling terkait atau terpadu.

Transparan memiliki arti bahwa Sekretariat Jenderal mampu menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Stakeholders Sekretariat Jenderal adalah *stakeholders* internal mencakup semua unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian dan stakeholders eksternal yang terdiri dari instansi pemerintah dan swasta.

II.3 TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi Sekretariat Jenderal. Berlandaskan pada visi dan misi tersebut, maka ditetapkan 3 (tiga) tujuan yang ingin dicapai Sekretariat Jenderal sebagai berikut:

1. Terwujudnya tata laksana pemerintahan di bidang industri yang mudah dan implementatif;
2. Tersedianya sistem layanan bidang industri yang terintegrasi, transparan, akurat, dan handal; dan
3. Terwujudnya pembangunan SDM Industri Kompeten yang dapat meningkatkan kinerja dan Daya Saing Industri.

II.4 SASARAN

Sekretariat Jenderal juga telah menetapkan sasaran strategis dan indikator kinerja dari masing-masing tujuan tersebut di atas yang berfungsi sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan. Berikut ini uraian mengenai sasaran strategis Sekretariat Jenderal untuk tahun 2015 – 2019.

Tujuan I : Terwujudnya tata laksana pemerintahan di bidang industri yang mudah dan implementatif

Sasaran 1

Terwujudnya dukungan manajemen pemerintahan yang berkualitas di lingkungan Kementerian Perindustrian, dengan indikator kinerja sasaran yaitu:

- a. Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan
- b. Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal
- c. Tingkat prestasi kerja rata-rata pegawai
- d. Persentase jumlah pegawai yang sesuai dengan Analisis Beban Kerja
- e. Kualitas Laporan Keuangan dan BMN
- f. Terfasilitasinya penyusunan peraturan perundang-undangan industri
- g. Terlaksananya pertimbangan hukum dan pendampingan hukum
- h. Tersedianya layanan organisasi dan tata laksana
- i. Tingkat kepuasan stakeholders terhadap pelayanan administrasi dan manajemen perkantoran



Sasaran 2

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian, dengan indikator kinerja sasaran yaitu:

- Tingkat kepuasan stakeholders pusat dan daerah terhadap kualitas sarana dan prasarana kerja

Tujuan II : Tersedianya sistem layanan bidang industri yang terintegrasi, transparan, akurat, dan handal

Sasaran 1

Tersedianya data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional, dengan indikator kinerja sasaran yaitu:

- a. Tersedianya modul pada sistem informasi industri
- b. Tersedianya data pada sistem informasi industri
- c. Tersedianya informasi pada sistem informasi industri

Sasaran 2

Meningkatnya kualitas layanan dan informasi publik, dengan indikator kinerja sasaran yaitu:

- a. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kemenperin
- b. Menurunnya persentase pemberitaan negatif Kemenperin

Tujuan III : Terwujudnya pembangunan SDM Industri Kompeten yang dapat meningkatkan kinerja dan Daya Saing Industri

Sasaran 1

Meningkatnya kompetensi SDM industri, dengan indikator kinerja sasaran yaitu:

- Jumlah SDM Industri yang bersertifikat kompetensi.

Sasaran 2

Tersedianya lembaga pendidikan & pelatihan SDM industri, dengan indikator kinerja sasaran yaitu:

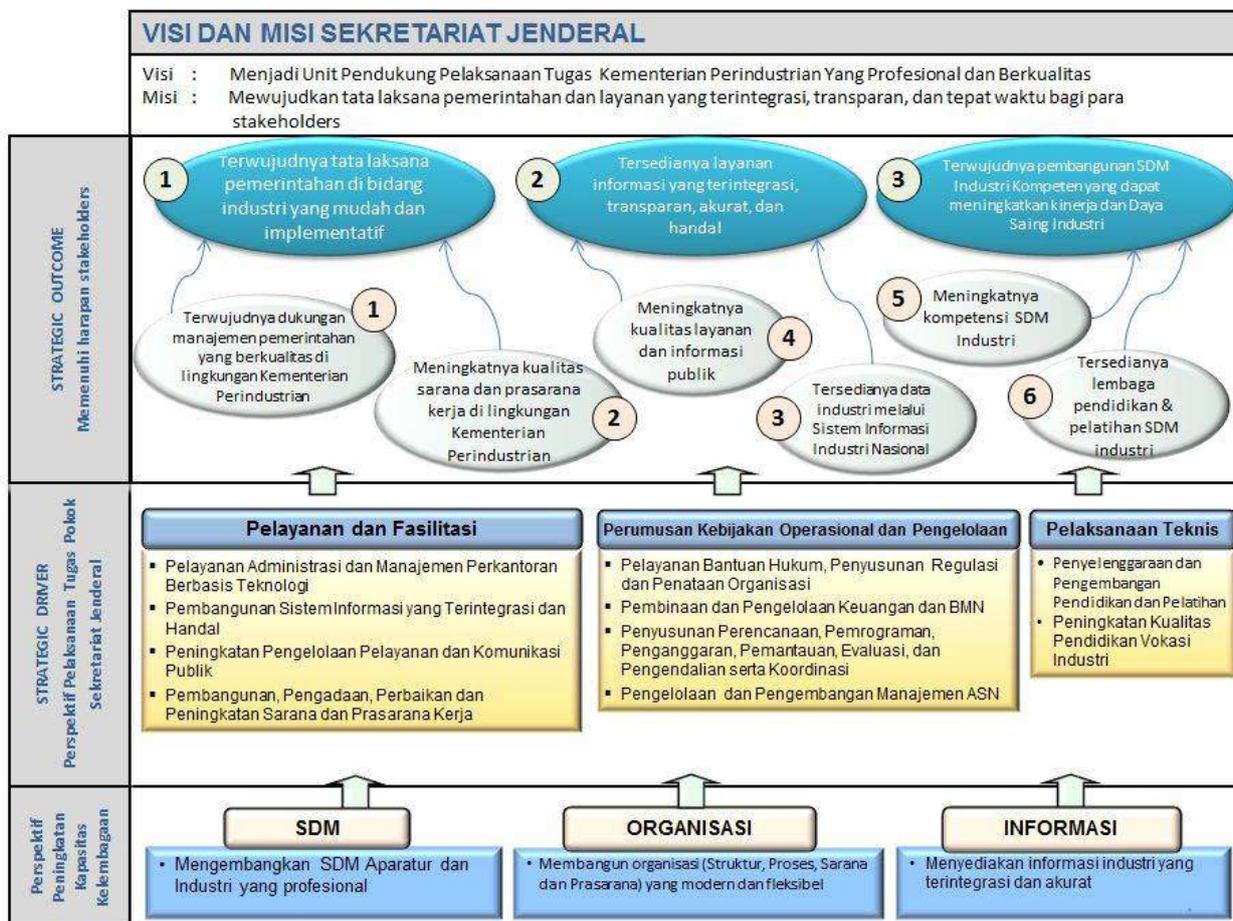
- Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan industri yang berbasis kompetensi.

Dari seluruh indikator kinerja sasaran, yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019 adalah:

1. Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan
2. Kualitas Laporan Keuangan dan BMN
3. Tingkat prestasi kerja rata-rata pegawai
4. Terfasilitasinya penyusunan peraturan perundang-undangan industri
5. Tingkat kepuasan stakeholders terhadap pelayanan administrasi dan manajemen perkantoran
6. Tersedianya data pada sistem informasi industri
7. Jumlah SDM Industri yang bersertifikat kompetensi
8. Menurunnya persentase pemberitaan negatif Kemenperin

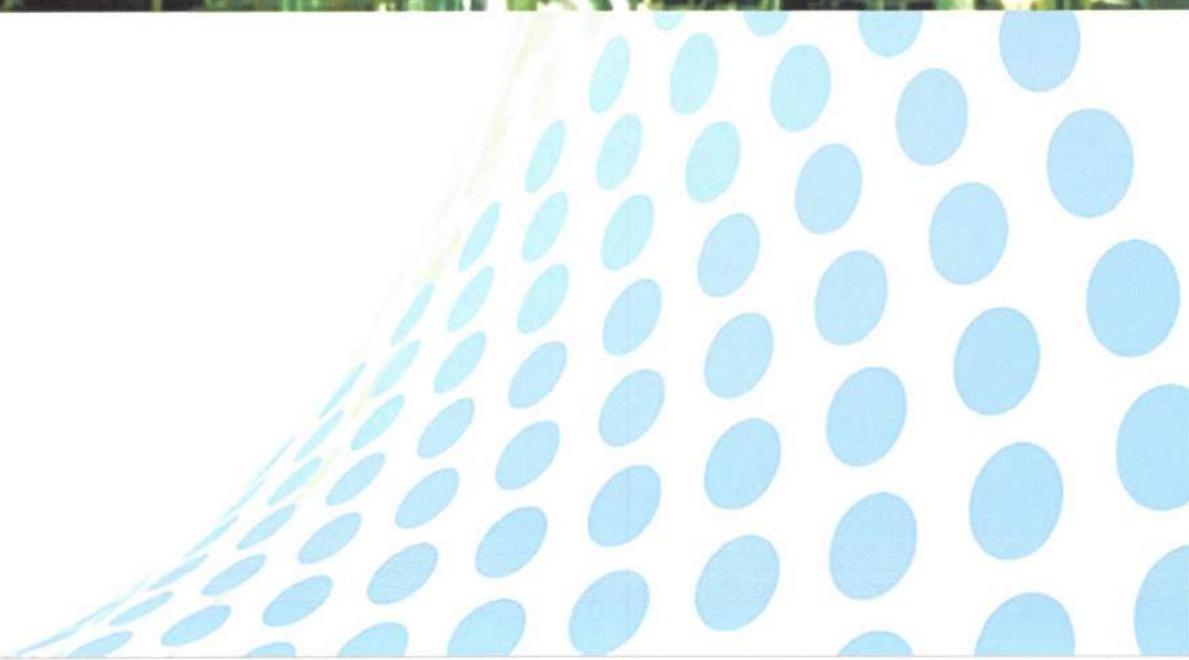
Berikut ini peta strategis Sekretariat Jenderal yang menggambarkan hubungan antara tujuan, sasaran strategis dan faktor-faktor yang mendukung pencapaiannya.

Gambar II-1 Peta Strategi Sekretariat Jenderal Tahun 2015 – 2019



A photograph of an industrial refinery at night, featuring large storage tanks and complex piping structures illuminated by artificial lights. The image is partially obscured by a semi-transparent blue rectangular overlay.

3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN SEKRETARIAT JENDERAL



III.1 ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat Jenderal yang telah ditetapkan, maka dirumuskan berbagai kebijakan sebagai arah/tindakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan. Adapun arah kebijakan Sekretariat Jenderal untuk tahun 2015 - 2019 sebagai berikut:

1. Mewujudkan perencanaan yang kredibel.
2. Menjadikan SDM Aparatur yang terampil, profesional, dan memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan tugas.
3. Mewujudkan tata kelola keuangan dan BMN yang baik dan benar.
4. Mewujudkan pelayanan prima di bidang hukum, organisasi, dan tata laksana.
5. Menjadikan institusi pendidikan dan pelatihan yang terpercaya dalam pengembangan SDM industri profesional.
6. Menjadikan instansi pelayanan informasi sektor industri yang prima dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
7. Mewujudkan pelayanan publik yang prima.
8. Menyediakan informasi yang lengkap dan akurat.

III.2 STRATEGI

Dalam mewujudkan tata laksana pemerintahan di bidang industri yang mudah dan implementatif, ditetapkan sasaran dalam usaha pencapaiannya, yaitu dengan mewujudkan dukungan manajemen pemerintahan yang berkualitas di lingkungan Kementerian Perindustrian dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam mencapai sasaran tersebut yaitu:

1. Pelayanan Administrasi dan Manajemen Perkantoran Berbasis Teknologi.
2. Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja.
3. Pelayanan Bantuan Hukum, Penyusunan Regulasi dan Penataan Organisasi.
4. Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan dan BMN.
5. Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian serta Koordinasi.
6. Pengelolaan dan Pengembangan Manajemen ASN.

Dalam menyediakan sistem layanan bidang industri yang terintegrasi, transparan, akurat, dan handal, ditetapkan sasaran dalam usaha pencapaiannya, yaitu dengan menyediakan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional dan Meningkatkan kualitas layanan dan informasi publik. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam mencapai sasaran tersebut yaitu:

1. Pembangunan Sistem Informasi yang Terintegrasi dan Handal.
2. Peningkatan Pengelolaan Pelayanan dan Komunikasi Publik.

Sedangkan untuk mewujudkan pembangunan SDM Industri Kompeten yang dapat meningkatkan kinerja dan Daya Saing Industri, ditetapkan sasaran dalam usaha pencapaiannya, yaitu dengan meningkatkan kompetensi SDM Industri dan menyediakan lembaga pendidikan & pelatihan SDM industri. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam mencapai sasaran tersebut yaitu:

1. Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan.
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi Industri.

III.3 PROGRAM

1. Program Pengembangan SDM Industri Dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kementerian Perindustrian

III.4 KEGIATAN

1. Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian serta Koordinasi
2. Pengelolaan dan Pengembangan Manajemen ASN
3. Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan dan BMN
4. Pelayanan Hukum dan Organisasi
5. Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Manajemen Perkantoran Berbasis Teknologi
6. Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan
7. Pembangunan Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi dan Handal

8. Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Komunikasi dan Informasi Publik
9. Pembangunan, pengadaan, perbaikan, dan peningkatan sarana dan prasarana kerja

III.5 TARGET JANGKA MENENGAH (2015-2019)

Berdasarkan tujuan dan Sasaran Strategi yang telah diuraikan pada bagian 2.3, kondisi yang harus dicapai pada tahun 2019 sebagai berikut:

a. Biro Perencanaan

- 1) Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan mencapai 90% pada tahun 2019
- 2) Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal mencapai nilai 85 pada tahun 2019

b. Biro Kepegawaian

- 1) Tingkat prestasi kerja rata-rata pegawai mencapai nilai 85 pada tahun 2019
- 2) Persentase jumlah pegawai yang sesuai dengan Analisis Beban Kerja mencapai 95% pada tahun 2019

c. Biro Keuangan

- 1) Kualitas Laporan Keuangan dan BMN mendapat nilai capaian standar tertinggi setiap tahunnya

d. Biro Hukum dan Organisasi

- 1) Terasilitasinya penyusunan peraturan perundang-undangan industri sebesar 95% setiap tahunnya
- 2) Terlaksananya pertimbangan hukum dan pendampingan hukum sebesar 95% setiap tahunnya
- 3) Tersedianya 1 (satu) laporan Layanan Organisasi dan Tata Laksana setiap tahunnya

e. Biro Umum

- 1) Tingkat kepuasan stakeholders mencapai 86% pada tahun 2019

f. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri

- 1) Terwujudnya 86.300 SDM Industri yang bersertifikat kompetensi dalam kurun waktu tahun 2015-2019
- 2) Tersedianya 58 lembaga pendidikan dan pelatihan industri yang berbasis kompetensi pada tahun 2019

g. Pusat Data dan Informasi

- 1) Tersedianya 1 (satu) modul pada sistem informasi industri setiap tahunnya
- 2) Tersedianya data pada sistem informasi industri sebesar 100% pada tahun 2019
- 3) Tersedianya 8 (delapan) jenis informasi pada sistem informasi industri pada tahun 2019

h. Pusat Komunikasi Publik

- 1) Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kemenperin dengan Indeks Kepuasan Pelanggan (skala 1- 4) sebesar 3,5 pada tahun 2019
- 2) Menurunnya persentase pemberitaan negatif Kemenperin menjadi 6% pada tahun 2019

III.6 KERANGKA REGULASI

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi serta meningkatkan kualitas kinerja Kementerian, maka perlu disusun dan ditetapkan regulasi yang mengatur pengelolaan internal Kementerian. Sekretariat Jenderal yang memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian, dirasa perlu untuk menyusun regulasi dimaksud. Adapun beberapa regulasi yang disusun dan ditetapkan selama periode 2015 – 2019 sebagai berikut:

Tabel III-1 Matriks Kerangka Regulasi Sekretariat Jenderal

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
1.	Rpermen tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian	Evaluasi Regulasi Existing & PermenPANRB tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja K/L	Biro Perencanaan	Seluruh Unit di Lingkungan Kementerian Perindustrian	Februari 2017
2.	Rpermen tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kemenperin	Evaluasi Regulasi Existing	Biro Perencanaan	Seluruh Unit di Lingkungan Kementerian Perindustrian	Juli 2016
3.	RPermen tentang Rencana Kerja Pembangunan Industri	Sebagai peraturan pelaksana UU No 3 tahun 2014	Biro Perencanaan	Seluruh Unit di Lingkungan Kementerian Perindustrian	Disusun setiap tahun, mulai tahun 2016
4.	Rpermen tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Daerah	Provinsi/Kabupaten/Kota memerlukan pedoman dalam menyusun REPIDA	Biro Perencanaan	Dinas Perindustrian Provinsi/Kabupaten/Kota	Oktober 2015
5.	Rpermen tentang Pedoman Penilaian Program dan Kegiatan Kementerian Perindustrian	Dalam rangka meningkatkan kesesuaian Rencana Program dan kegiatan dengan dokumen perencanaan	Biro Perencanaan	Seluruh Unit di Lingkungan Kementerian Perindustrian	Oktober 2015
6.	Rpermen tentang Tata Kelola DIPA di Lingkungan Kementerian Perindustrian	Evaluasi Regulasi Existing	Biro Keuangan	Seluruh Unit di Lingkungan Kementerian Perindustrian	Tahun 2015-2019
7.	Rpermen tentang Roadmap Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian	PermenPANRB tentang Pedoman Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi	Biro Keuangan	Seluruh Unit di Lingkungan Kementerian Perindustrian	Oktober 2015
8.	Rpermen tentang Tata Naskah Dinas Kemenperin	Evaluasi Regulasi Existing	Biro Umum	Seluruh Unit di Lingkungan Kementerian Perindustrian	Desember 2016

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
9.	Rpermen tentang Sistem Informasi Kearsipan Dinamis	UU 43 th 2009 tentang Kearsipan	Biro Umum	Seluruh Unit di Lingkungan Kementerian Perindustrian	November 2018
10.	Rpermen tentang Pedoman Jadwal Retensi Arsip	Evaluasi Regulasi Existing	Biro Umum	Seluruh Unit di Lingkungan Kementerian Perindustrian	November 2018
11.	Rpermen tentang Pedoman Tata Kearsipan (Pedoman Manual, Pedoman Klasifikasi & Kode)	Evaluasi Regulasi Existing	Biro Umum	Seluruh Unit di Lingkungan Kementerian Perindustrian	November 2017
12.	Rpermen tentang Pedoman Sistem Keamanan dan Akses Arsip Dinamis	UU 43 th 2009 tentang Kearsipan	Biro Umum	Seluruh Unit di Lingkungan Kementerian Perindustrian	Oktober 2019
13.	Rpermen tentang Perubahan Mekanisme Pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Perindustrian	Evaluasi pelaksanaan Pembayaran Tunkin	Biro Kepegawaian	Biro Keuangan dan pejabat Pembina kepegawaian di lingkungan Kemenperin	2016
14.	Rpermen tentang Tata Cara Administrasi Cuti di lingkungan Kemenperin	Evaluasi Cuti pegawai	Biro Kepegawaian	BKN, Menpan	2016
15.	Rpermen tentang Pendelegasian Kewenangan bidang kepegawaian	Evaluasi Organisasi Kementerian Perindustrian	Biro Kepegawaian	Biro Hukum dan Pejabat Pembina kepegawaian di lingkungan Kemenperin	2016
16.	Rpermen tentang Pedoman penataan kelembagaan	Kajian	Biro Hukum dan Organisasi	Seluruh Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian	2016-2019
17.	Rpermen tentang Pedoman penataan kelembagaan UPT	Kajian	Biro Hukum dan Organisasi	Seluruh Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian	2016-2019

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
18.	Rpermen tentang Pedoman Penyusunan Anjab	Kajian	Biro Hukum dan Organisasi	Seluruh Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian	2016-2019
19.	Rpermen tentang Pedoman Penyusunan Jabatan Fungsional	Kajian	Biro Hukum dan Organisasi	Seluruh Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian	2016-2019
20.	Rpermen tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Kemenperin	Evaluasi Regulasi Eksisting	Biro Hukum dan Organisasi	Seluruh Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian	2016-2019
21.	Rpermen tentang Pedoman Penyusunan perjanjian Kerja Sama di Kemenperin	Kajian	Biro Hukum dan Organisasi	Seluruh Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian	2016-2019
22.	Rpermen Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Kompetensi	PP tentang Sumber Daya Industri	Pusdiklat	Ditjen, Naker, BNSP, Rokum	2016
23.	Rpermen Organisasi tata kelola unit pendidikan vokasi di WPPI	PP tentang Sumber Daya Industri	Pusdiklat	Ristek Dikti, Menpan, PPI Rokum	2016
24.	Rpermen Pengembangan Pembina Industri berbasis kompetensi	PP tentang Sumber Daya Industri	Pusdiklat	LAN, Ropeg, Rokum, Dinas	2016
25.	Rpermen Pengembangan Lembaga Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Industri berbasis kompetensi	PP tentang Sumber Daya Industri	Pusdiklat	Dikdas, Ristek Dikti, BNSP, Rokum	2016

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
26.	Rpermen Peningkatan Jenjang Pendidikan Vokasi Industri	PP tentang Sumber Daya Industri	Pusdiklat	Ristek Dikti, Rokum	2017
27.	Rpermen tentang SIINas	PP tentang Sarana dan Prasarana	Pusdatin	Direktorat	November 2017
28.	Rkepmen tentang tata kelola TIK di lingkungan Kemenperin	Evaluasi TIK di lingkungan pemerintah	Pusdatin	Seluruh Unit di Lingkungan Kementerian Perindustrian	2016, 2017, 2018, dan 2019
29.	Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di lingkungan Kementerian Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perindustrian yaitu melaksanakan hubungan media massa, pemberitaan, analisis opini publik, promosi, publikasi, pameran, dan pencitraan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan komunikasi publik Dalam rangka melaksanakan amanat UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan kehumasan untuk mendukung pelaksanaan undang-undang tersebut oleh Kemenperin 	Pusat Komunikasi Publik	Unit kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian	2016

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
		<ul style="list-style-type: none"> • Untuk menjalankan tugas Kementerian Perindustrian selaku ketua Timnas Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (P3DN), dipandang perlu untuk melakukan kegiatan-kegiatan kehumasan seperti peningkatan jejaring kehumasan, publikasi dan pameran serta pelayanan publik yang diharapkan dapat mendukung program P3DN 			
30.	Pedoman Penilaian Layanan Informasi Publik	Sampai saat ini Kementerian Perindustrian belum mempunyai pedoman penilaian layanan informasi public yang diberikan kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi layanan informasi publik, Pusat Komunikasi Publik memandang perlu untuk membuat regulasi tentang standar penilaian dan evaluasi pelaksanaan layanan informasi public.	Pusat Komunikasi Publik	Unit kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian	2016
31.	Pedoman Website, Social Media	Berdasarkan UU No 14 thn 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, diperlukan standarisasi website dan social media unit kerja di Kementerian Perindustrian agar sesuai dengan kaidah transparansi dan mudah digunakan oleh publik.	Pusat Komunikasi Publik	Unit kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian	2016

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
32.	Pedoman Pelayanan Publik	Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kementerian perindustrian di butuhkan regulasi yang mengatur standar pelayanan publik yang mengacu pada UU No 25 thn 2009	Pusat Komunikasi Publik	Unit kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian	2016
33.	Pedoman Pelaksanaan Pameran Dalam Negeri	Berdasarkan Permenperin 500/2013, pelaksanaan pameran dalam negeri di koordinatori oleh Pusat Komunikasi Publik. Dengan seringnya dilakukan pameran dalam negeri, diperlukan regulasi yang mengatur standar pelaksanaan pameran agar pameran yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang baik terhadap industri	Pusat Komunikasi Publik	Unit kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian	2016
34.	Pedoman Jabatan Fungsional Pranata Humas	Pusat Komunikasi Publik merupakan Pembina jabatan fungsional pranata humas di Kementerian Perindustrian. Hingga saat ini Kementerian Perindustrian belum mempunyai aturan internal mengenai pedoman jabatan fungsional pranata humas, untuk itu diperlukan regulasi yang mengatur tata cara kerja fungsional humas agar dapat menjalankan tugasnya dengan professional.	Pusat Komunikasi Publik	Unit kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian	2016

III.7 KERANGKA KELEMBAGAAN

A. STRUKTUR ORGANISASI SAAT INI

Struktur organisasi Sekretariat Jenderal saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian No. 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian yang terdiri atas:

1. Biro Perencanaan

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program sektoral dan regional, rencana dukungan sumber daya dan fasilitasi industri, rencana investasi dan kerja sama investasi industri, serta evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana makro, program sektoral dan regional, serta anggaran;
- b. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana dukungan sumber daya, prasarana dan energi, serta fasilitasi industri;
- c. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana investasi dan kerja sama investasi industri;
- d. Penyiapan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program dan kinerja industri, analisis data sektoral dan regional serta pelaporan; dan
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Biro.

2. Biro Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, perencanaan, pengembangan, tata usaha dan pengelolaan sistem informasi dan manajemen kinerja sumber daya manusia aparatur di lingkungan Kementerian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

Penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur di lingkungan Kementerian;

Penyiapan bahan, koordinasi dan pembinaan serta penyusunan formasi, pengadaan sumber daya manusia aparatur serta pelaksanaan administrasi jabatan fungsional di lingkungan Kementerian;

- a. Penyiapan bahan, koordinasi dan pengembangan sistem penilaian kompetensi, pengembangan karir, dan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur di lingkungan Kementerian;
- b. Pengelolaan sistem informasi manajemen sumber daya manusia aparatur di lingkungan Kementerian;
- c. Pelaksanaan administrasi kepangkatan, dan pemberhentian sumber daya manusia aparatur di lingkungan Kementerian;
- d. Pelaksanaan manajemen kinerja sumber daya manusia aparatur di lingkungan Kementerian; dan
- e. Pelaksanaan tata usaha dan manajemen kinerja Biro.

3. Biro Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan pelaporan keuangan dan barang milik Negara Kementerian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan dokumen teknis pengelolaan anggaran dan barang milik negara;
- b. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran;
- c. Pengelolaan perbendaharaan dan penyelesaian kerugian negara;
- d. Pelaksanaan akuntansi dan administrasi pengelolaan barang milik negara;
- e. Penyediaan data dan informasi keuangan serta koordinasi dan pelaksanaan verifikasi penganggaran Kementerian; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja biro.

4. Biro Hukum dan Organisasi

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama, pelayanan dan bantuan hukum, serta penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kementerian Perindustrian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan pembinaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang industri dan bidang terkait industri;
- b. Evaluasi, penelaahan, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang industri dan bidang terkait industri;
- c. Perumusan perjanjian kerja sama di bidang industri;

- d. Pelaksanaan pelayanan, pemberian pertimbangan, advokasi, dan bantuan hukum;
- e. Pelaksanaan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Biro.

5. Biro Umum

Mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi, kerumahtanggaan, dan perlengkapan di lingkungan Kementerian serta pelayanan administrasi pimpinan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan tata persuratan, kearsipan, dan dokumentasi Kementerian;
- b. Pelaksanaan pelayanan administrasi pimpinan;
- c. Pelaksanaan urusan keprotokolan;
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga Kementerian; dan
- e. Pelaksanaan urusan perlengkapan di lingkungan Kementerian.

Selain 5 (lima) unit eselon II tersebut di atas, Sekretariat Jenderal juga mengoordinasikan tiga (3) unit Eselon II yang merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal yaitu:

1. Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Industri

Unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perindustrian melalui Sekretaris Jenderal. Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Industri mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan sumber daya manusia industri. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis rencana dan program di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan sumber daya manusia industri;
- b. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan sumber daya manusia industri;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan pengembangan sumber daya industri;

- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan sumber daya industri; dan
- e. Pelaksanaan tata usaha dan manajemen kinerja Pusdiklat Industri.

2. Pusat Data dan Informasi

Unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Perindustrian melalui Sekretaris Jenderal. Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan sistem informasi, manajemen data, serta pelayanan data dan informasi industri. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Pusat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pengelolaan data dan informasi;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta pengelolaan basis data;
- c. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi dan jaringan;
- d. Pelaksanaan pelayanan informasi industri;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan data dan informasi; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Pusat.

3. Pusat Komunikasi Publik

Unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Perindustrian melalui Sekretaris Jenderal. Pusat Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan hubungan antar lembaga, pemberitaan, publikasi, dan informasi pelayanan publik. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Pusat Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program komunikasi publik;
- b. Pelaksanaan hubungan dengan lembaga negara, lembaga pemerintah, dunia usaha dan lembaga pendidikan, riset dan teknologi;
- c. Pelaksanaan hubungan media massa, pemberitaan, analisis opini publik, promosi, publikasi, pameran, dan pencitraan;
- d. Pelaksanaan urusan layanan informasi publik serta pengelolaan informasi dan perpustakaan;

- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan komunikasi publik; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Pusat Komunikasi Publik.

Gambar III-1 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Saat Ini



B. KERANGKA KELEMBAGAAN YANG DIBUTUHKAN

Dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, disebutkan bahwa Sekretariat Jenderal merupakan Unsur Pembantu Pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden tersebut kemudian ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian yang mencabut ketentuan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sepanjang yang mengatur Kementerian Perindustrian.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

1. koordinasi kegiatan Kementerian Perindustrian;
2. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Perindustrian;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kementerian Perindustrian;
4. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pada prinsipnya fungsi Sekretariat Jenderal masih sama dengan yang terdahulu, sehingga organisasi di bawah Sekretariat Jenderal yang ada saat ini masih dianggap relevan dan sudah dapat menampung fungsi Sekretariat Jenderal. Namun, terdapat sedikit perubahan terkait dengan kembalinya pengembalian fungsi hubungan masyarakat yang semula diwadahi dalam unit organisasi Pusat Komunikasi Publik yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal menjadi dikembalikan ke dalam fungsi Sekretariat Jenderal.

Hal baru dalam fungsi Sekretariat Jenderal adalah dengan penambahan fungsi layanan pengadaan barang/jasa. Fungsi tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi. Sehingga fungsi ini dilekatkan pada Sekretariat Jenderal. Namun karena saat ini dirasakan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal telah memiliki beban kerja yang dirasakan cukup berat, maka fungsi tersebut belum dapat tertampung secara struktural pada Sekretariat Jenderal. Dengan demikian, susunan organisasi Sekretariat Jenderal terdiri atas:

1. Biro Perencanaan;
2. Biro Kepegawaian;
3. Biro Keuangan;
4. Biro Hukum dan Organisasi;
5. Biro Hubungan Masyarakat; dan
6. Biro Umum.

Dan 2 (dua) Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal yaitu:

1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri; dan
2. Pusat Data dan Informasi.

Gambar III-2 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Yang Dibutuhkan



C. Manajemen SDM Aparatur di Lingkungan Sekretariat Jenderal

Manajemen SDM Aparatur di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian berpedoman pada UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Manajemen PNS yang di atur dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutase, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan.

Dalam mewujudkan SDM Aparatur di lingkungan Sekretariat Jenderal yang professional dan kompeten, beberapa langkah strategis dilakukan dengan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan Pegawai

Pengadaan SDM Aparatur di lingkungan Kementerian Perindustrian dilakukan berdasarkan kebutuhan pegawai yang ditetapkan oleh Menteri. Pelaksanaan pengadaan SDM Aparatur di lingkungan Kementerian Perindustrian mengikuti Peraturan Kepala BKN No. 9 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS serta kebijakan pemerintah melalui Kementerian PAN dan RB.

2. Pengembangan karier

Sekretariat Jenderal melaksanakan pengembangan karir di lingkungan Kementerian Perindustrian berdasarkan penilaian kompetensi dan analisis kebutuhan diklat. Hal ini sesuai dengan amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi madya dilakukan berdasarkan seleksi terbuka dan kompetitif di lingkungan Pegawai Negeri Sipil serta berdasarkan sistem Merit.

3. Pola karir

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian no. 65/M-IND/PER/7/2014 tentang Pola Karir Pegawai Kementerian Perindustrian, tujuan utama penerapan pola karir adalah untuk mewujudkan pegawai yang berkompeten dan profesional yang mampu melaksanakan tugas dengan baik, efektif, serta efisien.

4. Penilaian kinerja

Sekretariat Jenderal dalam mendukung tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian untuk mewujudkan SDM Aparatur yang profesional adalah dengan melaksanakan dukungan pengelolaan manajemen kinerja. Pengelolaan manajemen kinerja ini terdiri atas pengelolaan disiplin pegawai, penilaian kinerja serta penghargaan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS, Kementerian perindustrian melaksanakan penilaian prestasi kerja terhitung mulai 1 Januari 2014. Penerapan PP No. 46 tahun 2011 dimaksud terdiri atas penetapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Penilaian SKP, Penilaian Perilaku berdasarkan sistem aplikasi online yang sudah dibangun.

5. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian

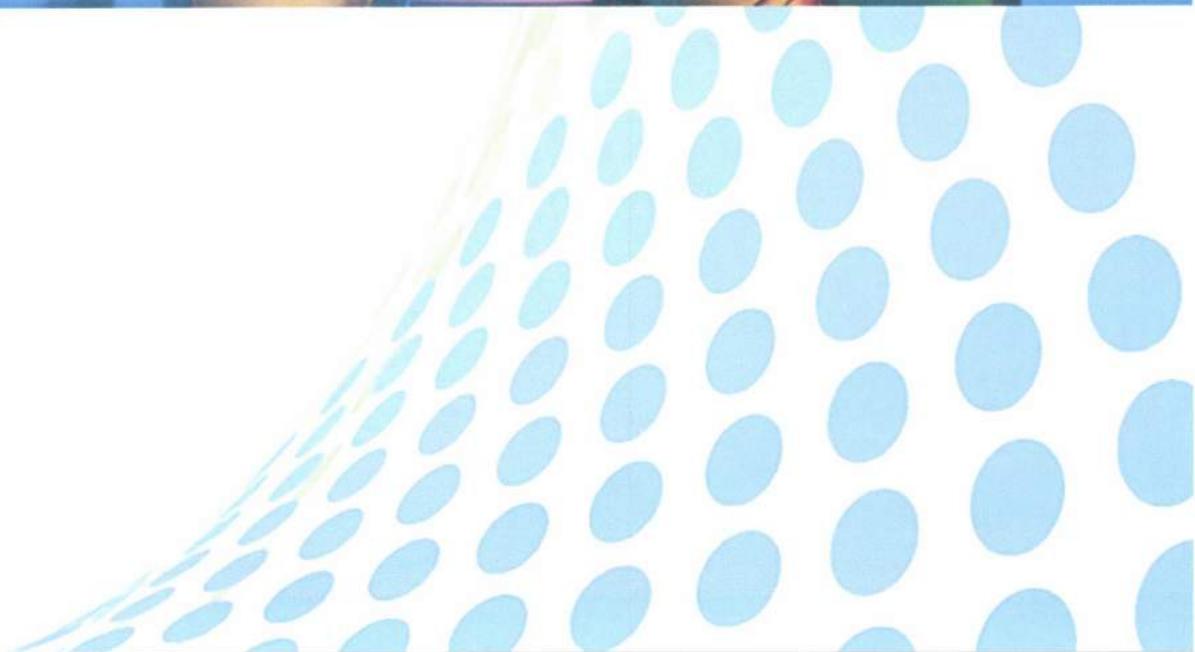
Salah satu dukungan Sekretariat Jenderal dalam mewujudkan database pegawai yang update. Data kepegawaian merupakan dasar pengambilan keputusan untuk merencanakan dan mengembangkan SDM Aparatur di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Salah satu rencana strategis kedepan adalah mendukung pelaksanaan e-PUPNS yang merupakan bagian dari amanat pelaksanaan Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya tentang sistem informasi ASN dan Peraturan Kepala BKN nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik Tahun 2015.

e-PUPNS secara elektronik merupakan proses pendataan ulang PNS melalui sistem teknologi informasi yang meliputi tahap pemutakhiran data oleh setiap PNS, serta validasi dan verifikasi data secara menyeluruh oleh Kementerian Perindustrian.

A photograph of laboratory glassware including three Erlenmeyer flasks with blue, orange, and purple liquids, a beaker with orange liquid, and a graduated cylinder with green liquid. A pipette is positioned over the beaker. Two blue capsules are on the surface to the left. The background is a blue gradient.

4. TARGET KINERJA DAN PENDANAAN



IV.1 TARGET KINERJA

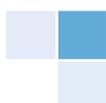
Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2015-2019, Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi serta struktur organisasi Kementerian Perindustrian yang dijabarkan pada bab III. Berikut ini program dan kegiatan Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2015 – 2019.

A. PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing SDM Industri serta menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian. Adapun sasaran-sasaran program dan indikator yang ingin dicapai dari pelaksanaan program ini adalah sebagai berikut:

Tabel IV-1 Sasaran dan Indikator Kinerja Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian Tahun 2015 - 2019

No.	Sasaran Program /Indikator	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Terwujudnya dukungan manajemen pemerintahan yang berkualitas di lingkungan Kementerian Perindustrian (Indeks Kepuasan Layanan Skala 1-4)	Indeks	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
-	<i>Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan</i>	Persen	90	90	90	90	90
-	<i>Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal</i>	Nilai	80	85	85	85	85
-	<i>Tingkat prestasi kerja rata-rata pegawai</i>	Nilai	76	78	80	82	85
-	<i>Persentase jumlah pegawai yang sesuai dengan Analisis Beban Kerja</i>	Persen	75	80	85	90	95
-	<i>Kualitas Laporan Keuangan dan BMN</i>	Nilai	Capaian Standar Tertinggi				
-	<i>Terfasilitasinya penyusunan peraturan perundang-undangan industri</i>	Persen	95	95	95	95	95
-	<i>Terlaksananya pertimbangan hukum dan pendampingan hukum</i>	Persen	95	95	95	95	95



No.	Sasaran Program /Indikator	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
	- <i>Tersedianya Layanan Organisasi dan Tata Laksana</i>	Laporan	1	1	1	1	1
	- <i>Tingkat kepuasan stakeholders</i>	Persen	82	83	84	85	86
2.	Meningkatnya kompetensi SDM industri	Orang	10.120	15.200	20.270	20.320	20.390
	- <i>Jumlah SDM Industri yang bersertifikat kompetensi</i>	Orang	10.120	15.200	20.270	20.320	20.390
3.	Tersedianya lembaga pendidikan & pelatihan SDM industri	Unit	13	19	12	7	7
	- <i>Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan industri yang berbasis kompetensi</i>	Unit	13	19	12	7	7
4.	Tersedianya data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional	Persen	50	65	75	85	100
	- <i>Tersedianya modul pada sistem informasi industri</i>	Modul	1	1	1	1	1
	- <i>Tersedianya data pada sistem informasi industri</i>	Persen	50	65	75	85	100
	- <i>Tersedianya informasi pada sistem informasi industri</i>	Jenis	5	6	7	8	8
5.	Meningkatnya kualitas layanan dan informasi publik	Indeks Kepuasan Pelanggan	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5
	- <i>Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kemenperin</i>	Skala 1-4	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5
	- <i>Menurunnya persentase pemberitaan negatif Kemenperin</i>	Persen	10	9	8	7	6

Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian serta Koordinasi

Kegiatan Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian serta Koordinasi dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dengan sasaran kegiatan, indikator, dan target sebagai berikut:

Tabel IV-2 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian serta Koordinasi Tahun 2015 – 2019

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian serta Koordinasi							
	Dokumen Perencanaan/Program, Penganggaran dan Pengendalian	Dokumen	14	11	11	11	15
	- Persentase Anggaran Setjen yang masuk dalam catatan halaman IV DIPA	%	20	18	15	12	10
	- Tingkat kepuasan pelayanan penyusunan dokumen perencanaan	Skala 1-4	3,2	3,6	3,8	3,9	4
	Pemantauan, Analisa, dan Evaluasi	Laporan	24	24	24	24	24
	- Nilai SAKIP Kementerian Perindustrian	Nilai	B	B	B+	A-	A
	- Jumlah dokumen pemantauan, analisa, dan evaluasi dengan hasil yang berkualitas	Jumlah	41	41	41	41	41
	Layanan Fungsional Perencana	Bulan Layanan	12	12	12	12	12
	- Penambahan jumlah fungsional perencana di Kementerian Perindustrian	Nilai	16	8	8	8	8
	- Jumlah dokumen yang dapat dinilai	Jumlah	6	6	6	6	6
	Layanan Perkantoran dan Manajemen Kinerja Biro	Bulan Layanan	12	12	12	12	12
	- Persentase terlaksananya layanan perkantoran	%	80	82	84	86	88

2. Pengelolaan dan Pengembangan Manajemen ASN

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Manajemen ASN dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian dengan sasaran kegiatan, indikator, dan target sebagai berikut:

Tabel IV-3 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Manajemen ASN Tahun 2015 – 2019

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
Pengelolaan dan Pengembangan Manajemen ASN							
	Tersedianya dokumen perencanaan dan pengembangan pegawai	Dokumen	1	1	1	1	1
	- Jumlah pegawai yang sesuai dengan Analisis Beban Kerja	%	75	80	85	90	95
	- Jumlah pegawai yang telah dinilai kompetensinya	%	-	80	85	90	95
	- Tersusunnya Standar Kompetensi untuk Pejabat Struktural	%	100	-	-	-	-
	Tersusunnya dokumen manajemen kinerja	Dokumen	1	1	1	1	1
	- Tingkat prestasi kerja rata-rata pegawai	Nilai	76	78	80	82	85

3. Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan dan BMN

Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan dan BMN dilaksanakan oleh Biro Keuangan dengan sasaran kegiatan, indikator, dan target sebagai berikut:

Tabel IV-4 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan dan BMN Tahun 2015 – 2019

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan dan BMN							
	Laporan keuangan dan BMN yang sesuai SAP dengan capaian tertinggi	Laporan	1	1	1	1	1
	Kualitas Laporan Keuangan dan BMN	Nilai dari Kementerian Keuangan	Capaian Standar Tertinggi				
	- Tersedianya kebijakan internal mengenai pelaksanaan dan pertanggung jawaban anggaran	Pedoman	3	3	3	3	3

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
	Layanan Perkantoran Biro Keuangan	Bulan Layanan	12	12	12	12	12
-	Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai di lingkungan Setjen dengan tepat waktu	Bulan Layanan	12	12	12	12	12
-	Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran Biro Keuangan	Bulan Layanan	12	12	12	12	12
-	Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran ULP	Bulan Layanan	12	12	12	12	12
-	Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran KDEI Taipei	Bulan Layanan	12	12	12	12	12
-	Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai di Otorita Asahan dengan tepat waktu	Bulan Layanan	12	12	12	12	12
-	Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran Otorita Asahan	Bulan Layanan	12	12	12	12	12

4. Pelayanan Hukum dan Organisasi

Kegiatan Pelayanan Hukum dan Organisasi dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Organisasi dengan sasaran kegiatan, indikator, dan target sebagai berikut:

Tabel IV-5 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Pelayanan Hukum dan Organisasi Tahun 2015 – 2019

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
Pelayanan Hukum dan Organisasi							
	Layanan Peraturan Perundang-undangan	Laporan	1	1	1	1	1
	Fasilitasi Penyusunan Per-uu-an bidang Industri dan bidang terkait industri	%	95	95	95	95	95
	Pembinaan Hukum	Laporan	1	1	1	1	1

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
	- Evaluasi produk hukum bidang industri	Laporan	2	5	5	5	5
	Layanan Informasi dan Dokumentasi Hukum	Laporan	1	1	1	1	1
	- Terlaksananya Pelayanan Informasi dan Dokumentasi hukum	Laporan	1	1	1	1	1
	Layanan Bantuan Hukum	Laporan	1	1	1	1	1
	- Permintaan konsultasi dan advokasi hukum yang terlayani	%	95	95	95	95	95
	Layanan Organisasi dan Tata Laksana	Laporan	1	1	1	1	1
	- Tersedianya layanan organisasi dan tata laksana	Laporan	1	1	1	1	1
	Laporan Manajemen Kinerja Biro Hukum dan Organisasi	Laporan	1	1	1	1	1
	- Tersedianya laporan Manajemen Kinerja BHO	Laporan	3	3	3	3	3
	Layanan perkantoran Biro Hukum dan Organisasi	Laporan	1	1	1	1	1
	- Terlaksananya layanan operasional BHO	Bulan Layanan	12	12	12	12	12

5. Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Manajemen Perkantoran Berbasis Teknologi

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Manajemen Perkantoran Berbasis Teknologi dilaksanakan oleh Biro Umum dengan sasaran kegiatan, indikator, dan target sebagai berikut:

Tabel IV-6 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Manajemen Perkantoran Berbasis Teknologi Tahun 2015 – 2019

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Manajemen Perkantoran Berbasis Teknologi							
	Pelayanan Pengelolaan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan	Bulan Layanan	12	12	12	12	12

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
	- Tingkat kepuasan pelayanan kerumahtanggaan & perlengkapan	%	82	83	84	85	86
	Pelayanan Pengelolaan Administrasi Kementerian dan Ketatausahaan Pimpinan yang Sistematis	Bulan Layanan	12	12	12	12	12
	- Tingkat kepuasan pelayanan administrasi dan ketatausahaan pimpinan	%	82	83	84	85	86

6. Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan

Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri dengan sasaran kegiatan, indikator, dan target sebagai berikut:

Tabel IV-7 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2015 – 2019

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan							
	Tersedianya Infrastruktur Kompetensi	Standar	20	20	20	20	20
	- Terbentuknya SKKNI	Standar	10	10	10	10	10
	- Terbentuknya LSP & TUK	Unit	10	10	10	10	10
	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Orang	10.120	15.200	20.270	20.320	20.390
	- Jumlah Asesor Kompetensi	Orang	150	150	150	150	150
	- Jumlah Pembina Industri yang memiliki sertifikat kompetensi (SI & EKIN)	Orang	420	450	480	500	500
	- Jumlah guru dan dosen yang memiliki sertifikasi	Orang	60	80	100	130	200
	- Jumlah pembina industri yang mengikuti rintisan gelar	Orang	200	230	250	250	250

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
	- Jumlah Tenaga Kerja lulusan pelatihan berbasis kompetensi (diklat 3 in 1)	Orang	5.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	- Jumlah Konsultan Industri yang memiliki sertifikat kompetensi	Orang	50	50	50	50	50
	- Jumlah Wirausaha industri yang memiliki sertifikat kompetensi melalui TPL	Orang	120	120	120	120	120
	- Jumlah wirausaha industri yang memiliki sertifikat kompetensi melalui Diklat Kewirausahaan	Orang	100	100	100	100	100
	- Jumlah tenaga kerja lulusan Pendidikan Kejuruan Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi	Orang	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
	- Jumlah tenaga kerja lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi	Orang	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	- Jumlah tenaga kerja lulusan pendidikan D1 & D2 yang lulusannya langsung diserap di industri	Orang	480	480	480	480	480
	Tersedianya Unit pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi	Unit	13	19	12	7	7
	- Jumlah Prodi yang berbasis kompetensi	Unit Prodi	10	10	9	4	4
	- Jumlah lembaga pelatihan yang berbasis kompetensi	Unit	2	7	1	1	1
	- Pendirian lembaga pendidikan dan pelatihan industri yang berbasis kompetensi di WPPI	Unit	1	2	2	2	2
	Tersusunnya laporan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	Laporan	1	1	1	1	1
	- Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai di lingkungan Pusdiklat, Unit Pendidikan dan Balai Diklat dengan tepat waktu	Bulan Layanan	12	12	12	12	12



7. Pembangunan Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi dan Handal

Kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi dan Handal dilaksanakan oleh Pusat Data dan Informasi dengan sasaran kegiatan, indikator, dan target sebagai berikut:

Tabel IV-8 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi dan Handal Tahun 2015 – 2019

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
Pembangunan Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi dan Handal							
	Data Base dan Data Warehouse yang mutakhir	Jenis	-	4	4	4	4
	- Tersedianya data dan informasi bidang industri	Jenis	-	4	4	4	4
	Analisis Data Industri	Jenis data	4	4	4	4	4
	- Tersedianya analisa data industri	Jenis data	4	4	4	4	4
	Penyajian Data Industri	Jenis sajian	2	2	2	2	2
	- Tersajinya informasi industri secara elektronik dan non elektronik	Jenis sajian	2	2	2	2	2
	Aplikasi e-Government	Jenis aplikasi	5	13	16	21	26
	- Meningkatnya efisiensi terkait pelayanan publik	%	20	25	30	35	40
	- Meningkatnya efisiensi dalam operasional perkantoran	%	30	35	40	45	50
	Sistem Jaringan yang Handal	Unit	1	1	1	1	1
	- Rata-rata up-time data center dalam setahun	%	95	98	98	98	98
	Layanan Kepegawaian	Orang	-	48	48	48	48
	- Indeks Kepuasan Pegawai	Skala 5	-	4	4,1	4,2	4,3
	Layanan Penganggaran dan Administrasi Keuangan	Laporan	-	6	6	6	6
	- Ketersediaan Dokumen Anggaran	Dokumen	-	1	1	1	1
	- Deviasi antara Target dan Rencana Anggaran	%	-	5	5	5	5



Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator		Satuan	Target				
				2015	2016	2017	2018	2019
	-	Laporan Pelaksanaan Verifikasi Transaksi Keuangan	Laporan	-	1	1	1	1
	-	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan	%	-	95	95	95	95
		Layanan Ketatalaksanaan	Laporan	-	3	3	3	3
	-	Jumlah Norma yang dikelola	Norma	-	3	3	3	3
	-	Meningkatnya kualitas tata kelola TIK	%	-	60	70	75	80
		Layanan Umum	Laporan	-	2	2	2	2
	-	Indeks Kepuasan Pegawai	Skala 5	-	4	4,1	4,2	4,3
	-	Tingkat kepuasan stakeholder LPSE	%	70	75	80	85	90
		Layanan perkantoran	Bulan	12	12	12	12	12
	-	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Pegawai Tepat Waktu	Bulan	12	12	12	12	12
	-	Terselenggaranya Operasional Perkantoran	Bulan	12	12	12	12	12

8. Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Komunikasi dan Informasi Publik

Kegiatan Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Komunikasi dan Informasi Publik dilaksanakan oleh Pusat Komunikasi Publik dengan sasaran kegiatan, indikator, dan target sebagai berikut:

Tabel IV-9 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Komunikasi dan Informasi Publik Tahun 2015 – 2019

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator		Satuan	Target				
				2015	2016	2017	2018	2019
Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Komunikasi dan Informasi Publik								
		Terselenggaranya Layanan Publik Kementerian Perindustrian	Jenis Layanan	3	3	3	3	3
	-	Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM skala 1-4	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5
		Terselenggaranya Layanan Kehumasan Kementerian Perindustrian	Jenis Layanan	3	3	3	3	3

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator		Satuan	Target				
				2015	2016	2017	2018	2019
	-	Persentase pemberitaan negatif sektor industri	%	10	9	8	7	6
	-	Tingkat kepuasan penyelenggaraan promosi produk dalam negeri	%	70	72	74	76	80
	-	Tingkat Kualitas Fasilitasi Hubungan Antar Lembaga	%	70	72	74	76	80
		Layanan perkantoran	Bulan Layanan	12	12	12	12	12
	-	Terbayarnya gaji dan tunjangan Pegawai di Lingkungan Pusat Komunikasi Publik dengan tepat waktu	Bulan Layanan	12	12	12	12	12
	-	Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran	Bulan Layanan	12	12	12	12	12
	-	Tersusunnya Standar Kompetensi untuk Sumber Daya Manusia	Laporan	1	1	1	1	1

B. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Kementerian Perindustrian dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal yang bertujuan untuk memberikan dukungan dalam penyediaan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana yang diperlukan Kementerian dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Adapun sasaran-sasaran program dan indikator yang ingin dicapai dari pelaksanaan program ini adalah sebagai berikut:

Tabel IV-10 Sasaran dan Indikator Kinerja Program Meningkatnya Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Kerja Tahun 2015 – 2019

No.	Sasaran Program /Indikator	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian	Jenis	5	6	6	7	7
	- <i>Tingkat kepuasan stakeholders pusat dan daerah</i>	%	80	81	82	83	84

Program Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana Kementerian Perindustrian mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan, dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja dilaksanakan oleh Biro Umum dengan sasaran kegiatan, indikator, dan target sebagai berikut:

Tabel IV-11 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan, dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja Tahun 2015 – 2019

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
Pembangunan, pengadaan, perbaikan, dan peningkatan sarana dan prasarana kerja							
	Peningkatan sarana dan prasarana satker pusat dan daerah	Daerah	3	3	4	4	5
	- Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana	%	90	90	90	90	90

IV.2 KERANGKA PENDANAAN

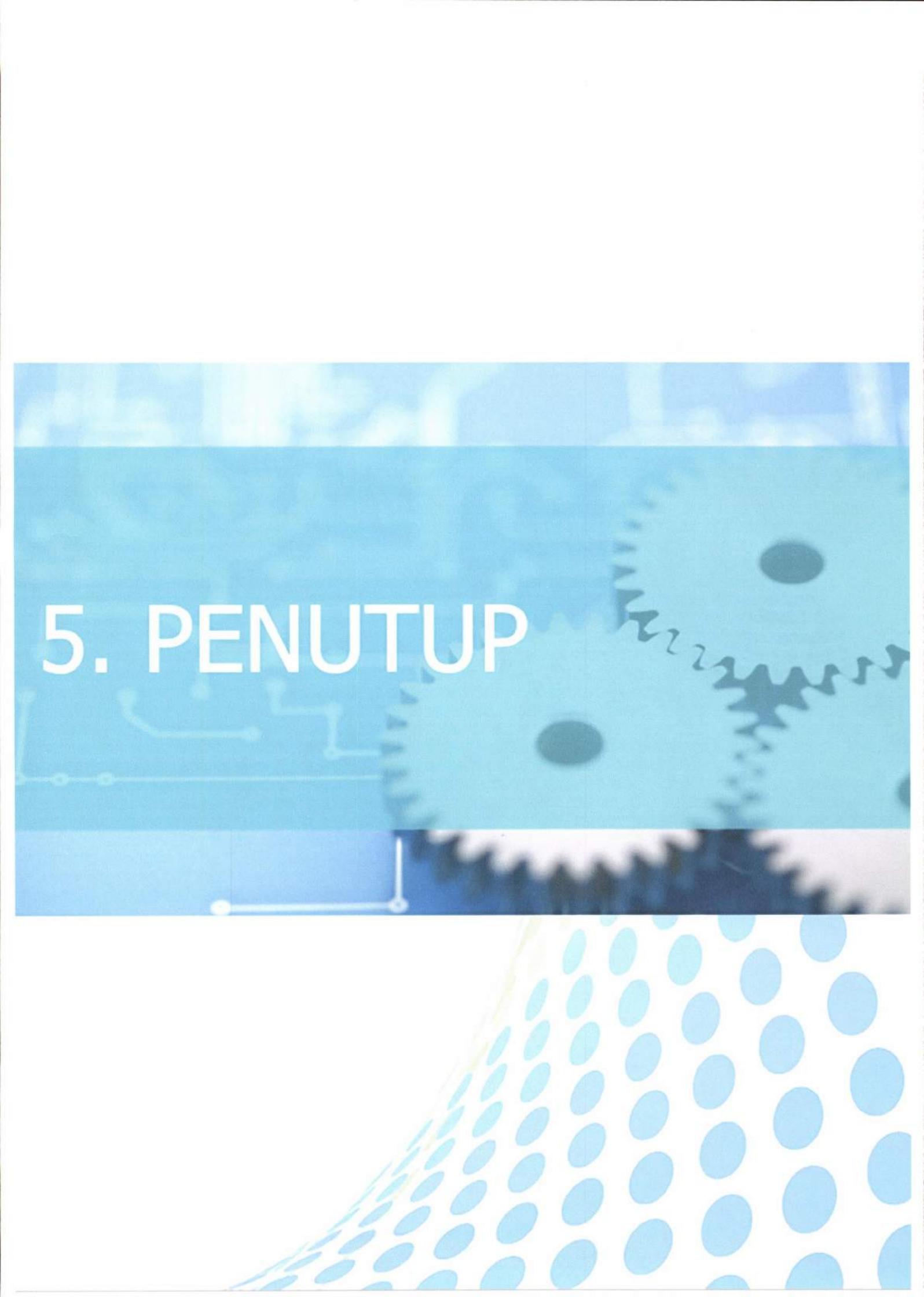
Dalam rangka mencapai sasaran strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2015- 2019, dibutuhkan pendanaan bagi program dan kegiatan sebagaimana yang dijabarkan di atas. kebutuhan pendanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian untuk tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel IV-12 Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Sekretariat Jenderal Tahun 2015 – 2019

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ALOKASI (Rp Juta)				
		2015	2016	2017	2018	2019
A	Program Pengembangan SDM Industri Dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian					
1	Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian serta Koordinasi	24,973.4	24,783.5	26,858.3	33,536.6	26,551.3
2	Pengelolaan dan Pengembangan Manajemen ASN	11,127.4	11,542.2	15,008.3	4,063.4	18,160.0

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ALOKASI (Rp Juta)				
		2015	2016	2017	2018	2019
3	Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan dan BMN	125,045.4	129,252.3	138,817.6	151,869.3	166,226.2
4	Pelayanan Hukum dan Organisasi	23,475.4	24,649.2	25,881.6	27,175.7	28,534.5
5	Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Manajemen Perkantoran Berbasis Teknologi	29,176.0	31,218.3	33,403.6	35,741.9	39,068.5
6	Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan	503,409.0	686,415.4	701,197.7	708,967.3	741,204.9
7	Pembangunan Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi dan Handal	31,296.3	34,200.1	37,639.1	40,540.6	46,450.2
8	Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Komunikasi dan Informasi Publik	29,541.7	32,495.8	35,745.4	39,319.9	43,251.9
B	Program Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana Kementerian Perindustrian					
1	Pembangunan, pengadaan, perbaikan, dan peningkatan sarana dan prasarana kerja	20,305.3	21,726.7	23,247.5	24,874.8	26,616.1
TOTAL		798,349.9	996,283.5	1,037,799.1	1,066,089.5	1,136,063.6

Rincian kinerja dan kebutuhan pendanaan untuk masing-masing program dan kegiatan disajikan pada matriks kinerja dan pendanaan sebagaimana terdapat pada lampiran renstra ini.

The image is a graphic design with a blue and white color scheme. The top half features a dark blue background with a pattern of gears and circuitry lines. The text '5. PENUTUP' is written in white, bold, sans-serif font across the middle. The bottom half features a white background with a pattern of blue circles that tapers off to the left.

5. PENUTUP

Rencana strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2015 – 2019 merupakan rencana kerja jangka menengah yang disusun berdasarkan TUPOKSI Sekretariat Jenderal dan UU no. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana strategis tersebut juga merupakan penjabaran program, kegiatan, sasaran, dan indikator kinerja dalam upaya untuk mencapai visi dan misi Biro Keuangan selama lima tahun. Penyusunan Renstra dilakukan secara sistematis, komprehensif, integratif, dan sinergis dengan menggunakan alat bantu Peta Strategi dan Key Performance Indicator (KPI) agar penggunaan sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal akan direviu secara berkala setiap tahunnya dan dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap perubahan kebijakan.

Kegiatan-kegiatan tahunan telah disusun dan direncanakan berdasarkan kondisi lingkungan saat ini. oleh karena itu seiring dengan berjalannya waktu pelaksanaan, kegiatan-kegiatan tersebut dapat diperkaya sesuai dengan perubahan lingkungan yang ada ketika menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Renstra Sekretariat Jenderal ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan memberikan kejelasan terhadap tahap-tahap pencapaian visi dan misi Sekretariat Jenderal secara sistematis.



LAMPIRAN 1 :CAPAIAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL
TAHUN 2010-2014

CAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2010-2014

NO	PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	2010		2011		2012		2013		2014		KETERANGAN
					T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)
I	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN		- Terlaksananya pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian	Persen	100										Sekretariat Jenderal
1	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan	- Meningkatnya kualitas perencanaan	- Persentase maksimal anggaran yang diblokir (tanda bintang) dari Pagu Definitif Kementerian	Persen	15	12	15	20	10	10	10	24	9	10	Biro Perencanaan 2014 data belum tersedia (capian s.d 2013)
			- Persentase maksimal revisi DIPA dari Pagu Kementerian tahun berjalan	Persen	15	11,6	15	19,64	10	10	10	10	9	9	
			- Persentase minimal realisasi anggaran Kementerian	Persen	80	87,22	80	84,06	85	98	85	83,9	90	91,55	
2	Pengembangan SDM Industri	- Peningkatan koordinasi, perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian, sistem informasi dan manajemen kinerja sumber daya manusia aparatur di lingkungan Kementerian Perindustrian	- Dokumen Perencanaan SDM Aparatur	Dokumen							6	6	6	6	Biro Kepegawaian
			- Dokumen pengelolaan urusan kepegawaian	Dokumen	34	34	34	34	34	34	34	16	13	13	
			- Layanan Manajemen Kinerja	Laporan	7	7	7	7	7	7	7	6	5	5	
3	Meningkatkan Sistem Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Negara yang Profesional	- Peningkatan pengelolaan keuangan dan BMN, serta predikat WTP bagi Kementerian Perindustrian terus bertahap	- status WTP (laporan)	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Biro Keuangan
		- Terbayarkannya Gaji, Honorarium dan vakasi Pegawai	- Persentase pembayaran gaji tepat waktu (3 hari kerja)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	
		- Pemutakhiran data barang milik negara yang paling mutakhir	- jumlah daerah	Daerah	17	17	17	17	17	17	17	17	0	0	
		- Mewujudkan Pelaksanaan anggaran yang tepat sasaran dan tepat waktu	- Persentase realisasi anggaran	Persen	90	87,22	90	84,06	90	98	90	83,9	90	91,55	menggantikan sasaran no 2 & 3
		- Peningkatan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf	- Jumlah unit	Unit							32	32	61	61	
4	Pelaksanaan Ketatausahaan Pimpinan, Pelaksanaan Urusan Keprotokolan dan Keamanan Dalam, Tata Persuratan dan Kearsipan, dan Kerumahtanggaan	- Peningkatan Pelaksanaan Ketatausahaan Pimpinan, Pelaksanaan Urusan Keprotokolan dan Keamanan Dalam, Tata Persuratan dan Kearsipan, dan Kerumahtanggaan	- Terselenggaranya layanan administrasi dan Ketatausahaan pimpinan dan Kementerian	Layanan	80	80	85	85	90	90	95	95	100	92	Biro Umum
			- Terpeliharanya sarana dan prasarana kerja	Jenis	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
			- Terciptanya keamanan dan ketertiban lingkungan kantor	Orang Petugas Keamanan	420	420	420	420	420	432	432	432	432	396	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	2010		2011		2012		2013		2014		KETERANGAN		
					T	R	T	R	T	R	T	R	T	R			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		
5	Peningkatan Kualitas Layanan di Bidang Hukum dan Organisasi	- Peningkatan Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang	- Jumlah Peraturan Perundang-undangan Bidang Industri	Peraturan	50	153	50	143	50	92	50	57	50	59	Biro Hukum dan Organisasi		
			- Jumlah Kajian Hukum Bidang Industri	Kajian	2		2	1	2	1	2	2	2	0			
		- Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan	- Database Informasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Industri yang Up to Date	Aplikasi/Peraturan	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	200 Peraturan	438 Peraturan	200 Peraturan	254 peraturan	200 Peraturan	114 Peraturan			
			- Jumlah Peraturan Perundang-undangan Bidang Industri yang Dipublikasi	Instansi	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550			
		- Peningkatan Kualitas Layanan dan Bantuan Hukum	- Jumlah Perkara Hukum yang Diadvokasi	Perkara	6	4	6	2	6	10	6	9	6	5			
			- Jumlah Masalah Hukum yang disuluh	Masalah Hukum	1	2	1	2	1	1	1	2	1	1			
		- Peningkatan Koordinasi Penataan Organisasi dan Tata Laksana	- Jumlah Peraturan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian yang Efektif dan Efisien	Peraturan Ortaker Unit Organik	1		1										1 peraturan tentang Ortaker UPT (Balai Diklat Industri)
				Peraturan Pedoman Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1		1	2	1	1	1	1	1	0			
			- Jumlah Kajian Kinerja Organisasi Kementerian Perindustrian	Kajian Kinerja Unit Organik				1	1	1	1	1	1	0			
				Kajian Kinerja Unit Pelaksana Teknis			1		1	1	2	2	3	0			
	Kajian Kinerja Unit Pendidikan					1	0	2		3	0						
- Prosentase Unit Organisasi yang Menerapkan Budaya Kerja 5K	Persen	80	100	85	100	90	100	95	98	100	100						
- Prosentase Unit Organisasi yang Menerapkan Sistem Manajemen Mutu Berbasis ISO 9001 - 2008	Persen	5		25		50	27	75	27	100	27						
6	Pembangunan Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi dan Handal	- Terlaksananya pembinaan sistem informasi, pengumpulan dan pengolahan data, sistim jaringan informasi dan pelayanan data/informasi industri	- jumlah data perusahaan	Perusahaan	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	-	Pusat Data dan Informasi		
			- jumlah produk yang telah terverifikasi (perusahaan)	Produk	390	390	1.000	1.000	1.000	1.000	390	1.012	600	1.127		Laporan Termin III 2014	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	2010		2011		2012		2013		2014		KETERANGAN	
					T	R	T	R	T	R	T	R	T	R		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)	
7	Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Publik	- Terlaksananya pencitraan, pengelolaan layanan publik, hubungan antar lembaga, publikasi dan penyebarluasan informasi kebijakan industri, ketatausahaan dan manajemen kinerja	- Jumlah pelayanan publik 23.500 orang	Orang	0	0	4.500	157	6.000	6.406	6.500	9.916	6.500	9.726	Pusat Komunikasi Publik	
			- Jumlah penyelenggaraan koordinasi lintas sektoral, lembaga tinggi negara dan sosialisasi kebijakan informasi sektor industri sebanyak 130 kali	kali	0	0	25	30	30	45	35	43	40	42		
			- Jumlah informasi industri yang dipublikasikan 129500	Informasi	0	0	22.000	24.655	32.500	39.644	35.000	39.854	40.000	46.684		
			- Jumlah pelayanan ketatausahaan dan manajemen kinerja 250 orang	Orang	0	0	55	54	60	49	65	54	70	61		
8	Peningkatan Kualitas SDM Industri	- Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur dan SDM Industri	- Jumlah SDM Aparatur dan SDM Industri telah mengikuti diklat sebanyak 14330 orang	Orang	1.930	2.477	2.700	2.794	3.000	8.340	3.200	3.794	3.500	6.783	Pusat Pendidikan dan Latihan	
		- Meningkatnya Koordinasi dan fasilitasi pengembangan SDM Industri	- 15 Koordinasi dan fasilitasi	Koordinasi dan Fasilitasi	1	1	4	4	4	3	3	4	3	4		
		- Terciptanya SDM industri ahli madya sesuai dengan kebutuhan industri	- Jumlah lulusan SDM ahli madya sebanyak 7670 orang	Orang	1.360	1.749	1.450	1.898	1.540	2.066	1.620	2.069	1.700	2.069		
		- Terciptanya SDM industri ahli siap kerja sesuai dengan kebutuhan industri	- Jumlah lulusan SDM terampil sebanyak 7150 orang	Orang	1.100	1.242	1.250	1.304	1.400	1.328	1.600	1.362	1.800	1.357		
		- Rintisan Gelar	- Jumlah Aparatur Perindustrian yang melaksanakan pendidikan S3	Orang	10	10	10	9	9	9	20	19	31	31		
			- Jumlah Aparatur Perindustrian yang melaksanakan pendidikan S2	Orang	30	30	30	30	90	86	140	136	138	138		
			- Jumlah Aparatur Perindustrian yang melaksanakan pendidikan S1	Orang	5	5	5	5	8	8	10	10	8	8		
			- Jumlah SDM Industri yang mengikuti program TPL Beasiswa	Orang	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340		
		1 Pendidikan kejuruan industri berbasis SBI dan kompetensi	- Terbentuknya LSP dan TUK	Unit Kerja					2	2	5	5	2	3		
			- Terwujudnya Workshop/ Teaching Factory	Unit Kerja					2	2	5	5	2	3		
			- Terwujudnya sistem penyelenggaraan pendidikan berbasis SBI	Persen					40	40	60	60	80	80		
		2 Pendidikan tinggi industri berbasis spesialisasi dan kompetensi	- Terbentuknya LSP dan TUK	Unit Kerja					2	2	4	4	2	2		
			- Terwujudnya Workshop/ Teaching Factory	Unit Kerja					2	2	4	4	2	2		
			- Terwujudnya sistem penyelenggaraan pendidikan berbasis spesialisasi	Persen					40	40	60	60	70	70		

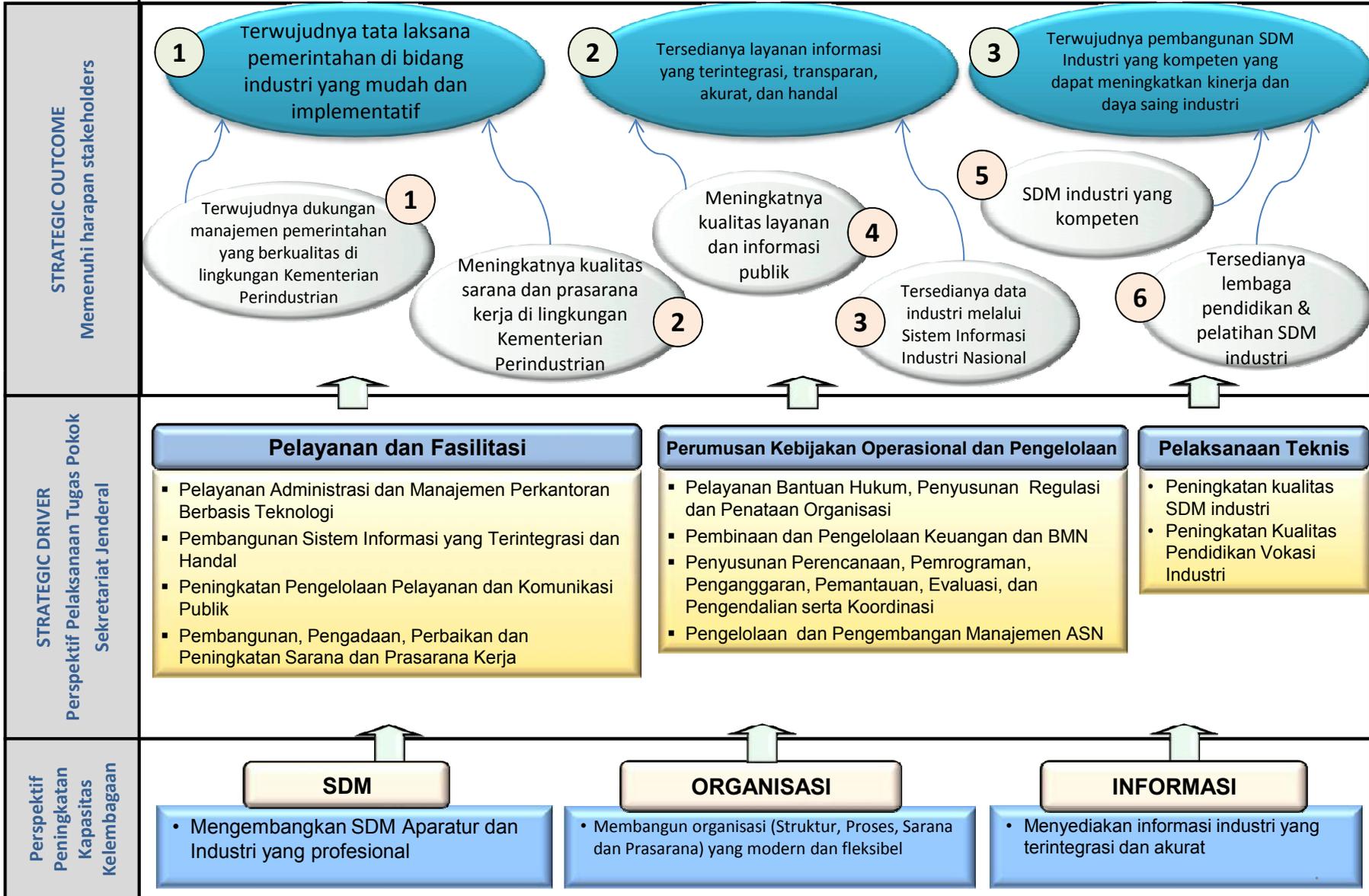
NO	PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	2010		2011		2012		2013		2014		KETERANGAN
					T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)
		3. Pengembangan BDI menjadi Pusat Pelatihan IKM sesuai Spesialisasi dan Kompetensinya	- Terbentuknya LSP dan TUK	Unit Kerja					2	2	3	4	2	2	
			- Terwujudnya Workshop/ Teaching Factory	Unit Kerja					2	2	3	4	2	2	
			- Terwujudnya sistem penyelenggaraan pendidikan berbasis spesialisasi	Persen					40	40	60	60	70	70	
		4. Fasilitasi pengembangan kompetensi SDM Industri :	- Jumlah SKKNI	SKKNI					2	2	2	2	2	5	
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR														Sekretariat Jenderal
	1. Pembangunan, pengadaan, perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana kerja	- Terkelolanya sarana prasarana kerja	- Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai (%)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	90	Biro Umum
		- Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja	- Peningkatan sarana dan prasarana kerja	Sarana dan Prasarana	80	80	85	85	90	90	95	95	100	109	Unit Layanan Pengadaan
	- Peningkatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	- terlaksananya perencanaan, pengorganisasian, pembinaan, pengawasan serta evaluasi penggunaan kebutuhan tata kelola administrasi pengadaan barang dan jasa seluruh satuan organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian	- Pelaksanaan Lelang sesuai dengan waktu yang direncanakan (%)	Persen	100	337	100	331	100	315	100	362	100	86,62	



LAMPIRAN 2 :PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL

VISI DAN MISI SEKRETARIAT JENDERAL

Visi : Menjadi Unit Pendukung Pelaksanaan Tugas Kementerian Perindustrian Yang Berkualitas
 Misi : Mewujudkan tata laksana pemerintahan dan layanan yang terintegrasi, transparan, dan tepat waktu bagi para stakeholders



Kode	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target					Biro Perencanaan	Biro Kepegawaian	Biro Keuangan	Biro Hukum dan Organisasi	Biro Umum	Pusdiklat Industri	Pusdatin	Puskom
				2015	2016	2017	2018	2019								
	Meningkatnya kualitas layanan dan informasi publik (Indeks Kepuasan Pelanggan)		Indeks Kepuasan Pelanggan skala 1-4	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5								
		Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kemenperin	Indeks Kepuasan Pelanggan skala 1-4	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5								•
		Menurunnya persentase pemberitaan negatif Kemenperin	Persen	10	9	8	7	6								•
	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian (Jenis)		Jenis	5	6	6	7	7								
		Tingkat kepuasan stakeholders pusat dan daerah	Persen	80	81	82	83	84					•			

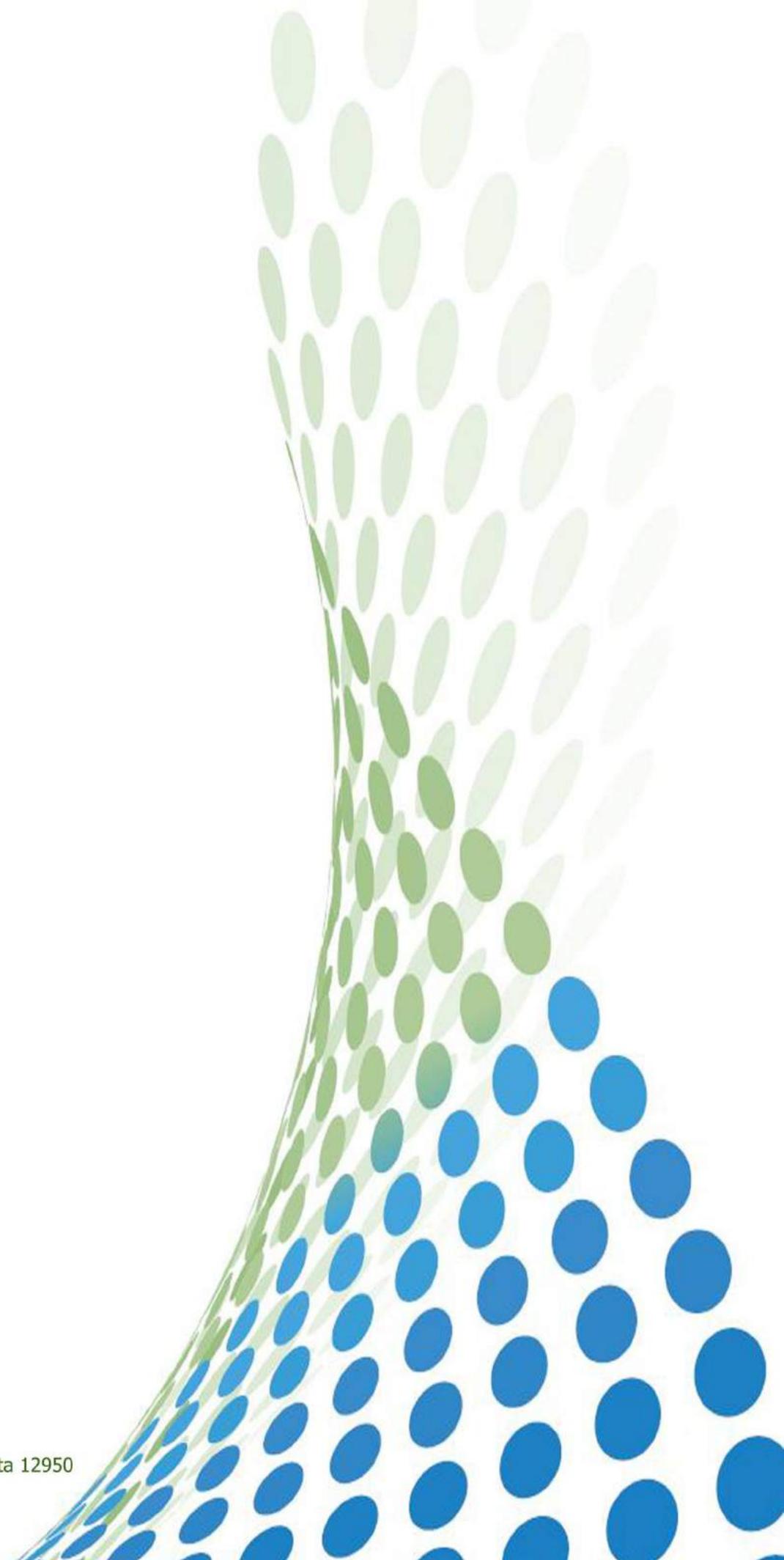


LAMPIRAN 3 : MATRIKS TARGET KINERJA DAN PENDANAAN
SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2015-2019

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Rp Juta)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Layanan Fungsional Perencana (bulan layanan)	Jakarta	12	12	12	12	12	907,4	822,1	863,2	906,4	951,7		
	- Penambahan jumlah fungsional perencana di Kementerian Perindustrian (nilai)		16	8	8	8	8							
	- Jumlah dokumen yang dapat dinilai (jumlah)		6	6	6	6	6							
	Layanan Perkantoran dan Manajemen Kinerja Biro (bulan layanan)	Jakarta	12	12	12	12	12	1.611,3	1.691,9	1.776,5	1.865,3	1.958,6		
	- Persentase terlaksananya layanan perkantoran (%)		80	82	84	86	88							
Pengelolaan dan Pengembangan Manajemen ASN								11.127,4	11.542,2	15.008,3	4.063,4	18.160,0	Biro Kepegawaian	
	Tersedianya dokumen perencanaan dan pengembangan pegawai	Jakarta	1	1	1	1	1	9.700,9	11.074,8	12.182,3	954,8	14.740,6		
	- Jumlah pegawai yang sesuai dengan Analisis Beban Kerja (persentase)		75	80	85	90	95							
	- Jumlah pegawai yang telah dinilai kompetensinya (persentase)		-	80	85	90	95							
	- Tersusunnya Standar Kompetensi untuk Pejabat Struktural (presentase)		100	-	-	-	-							
	Tersusunnya dokumen manajemen kinerja		1	1	1	1	1	1.426,4	467,3	2.826,0	3.108,6	3.419,4		
	- Tingkat prestasi kerja rata-rata pegawai (nilai)		76	78	80	82	85							
Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan dan BMN								125.045,4	129.252,3	138.817,6	151.869,3	166.226,2	Biro Keuangan	
	Laporan keuangan dan BMN yang sesuai SAP dengan capaian tertinggi		1	1	1	1	1	9.921,1	11.613,2	12.004,5	13.204,9	14.525,4		
	- Kualitas Laporan Keuangan dan BMN (Nilai dari Kementerian Keuangan)		Capaian Standar Tertinggi											
	- Tersedianya kebijakan internal mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran (pedoman)		3	3	3	3	3							
	Layanan Perkantoran Biro Keuangan (Bulan layanan)	Jakarta	12	12	12	12	12	115.124,3	117.639,2	126.813,1	138.664,4	151.700,8		
	- Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai di lingkungan Setjen dengan tepat waktu (Bulan layanan)		12	12	12	12	12							
	- Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran Biro Keuangan (Bulan layanan)		12	12	12	12	12							
	- Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran ULP (Bulan layanan)		12	12	12	12	12							
	- Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran KDEI Taipei (Bulan layanan)		12	12	12	12	12							
	- Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai di Otorita Asahan dengan tepat waktu (Bulan layanan)		12	12	12	12	12							
	- Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran Otorita Asahan (Bulan layanan)		12	12	12	12	12							
Pelayanan Hukum dan Organisasi								23.475,4	24.649,2	25.881,6	27.175,7	28.534,5	Biro Hukum dan Organisasi	
	Layanan Peraturan Perundang-undangan		1	1	1	1	1	7.804,6	8.194,8	8.604,6	9.034,8	9.486,6		
	- Fasilitasi Penyusunan Per-uu-an bidang Industri dan bidang terkait industri		95%	95%	95%	95%	95%							
	Pembinaan Hukum		1	1	1	1	1	3.795,4	3.985,2	4.184,4	4.393,6	4.613,3		
	- Evaluasi produk hukum bidang industri (laporan)		2	5	5	5	5							
	Layanan Informasi dan Dokumentasi Hukum		1	1	1	1	1	5.386,4	5.655,8	5.938,6	6.235,5	6.547,3		
	- Terlaksananya Pelayanan Informasi dan Dokumentasi		1	1	1	1	1							
	Layanan Bantuan Hukum		1	1	1	1	1	806,4	846,7	889,0	933,5	980,1		
	- permintaan konsultasi dan advokasi hukum yang terlayani		95%	95%	95%	95%	95%							
	Layanan Organisasi dan Tata Laksana		1	1	1	1	1	2.607,8	2.738,1	2.875,0	3.018,8	3.169,7		
	- Tersedianya layanan organisasi dan tata laksana (laporan)		1	1	1	1	1							
	Laporan Manajemen Kinerja Biro Hukum dan Organisasi		1	1	1	1	1	1.669,1	1.752,6	1.840,2	1.932,2	2.028,8		
	- Tersedianya laporan manajemen kinerja BHO		3	3	3	3	3							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Rp Juta)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Layanan perkantoran Biro Hukum dan Organisasi		1	1	1	1	1	1.405,7	1.476,0	1.549,8	1.627,3	1.708,7		
	- Terlaksananya layanan operasional BHO (bulan layanan)		12	12	12	12	2							
Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Manajemen Perkantoran Berbasis Teknologi								29.176,0	31.218,3	33.403,6	35.741,9	39.068,5	Biro Umum	
	Pelayanan Pengelolaan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan (Bulan layanan)		12	12	12	12	12	22.439,7	24.010,5	25.691,2	27.489,6	30.238,6		
	- Tingkat kepuasan pelayanan kerumahtanggaan & perlengkapan (Persentase)		82	83	84	85	86							
	Pelayanan Pengelolaan Administrasi Kementerian dan Ketatausahaan Pimpinan yang Sistematis (Bulan Layanan)		12	12	12	12	12	6.736,3	7.207,9	7.712,4	8.252,3	8.829,9		
	- Tingkat kepuasan pelayanan administrasi dan ketatausahaan pimpinan (Persentase)		82	83	84	85	86							
Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan								503.409,0	686.415,4	701.197,7	708.967,3	741.204,9	Pusdiklat Industri	
	Tersedianya Infastuktur Kompetensi (standar)		20	20	20	20	20	12.000,0	12.000,0	12.000,0	12.000,0	12.000,0		
	- Terbentuknya SKKNI (standar)		10	10	10	10	10							
	- Terbentuknya LSP & TUK (unit)		10	10	10	10	10							
	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi (orang)		10.120	15.200	20.270	20.320	20.390	200.700,0	232.200,0	263.400,0	264.050,0	265.100,0		
	- Jumlah Asesor Kompetensi (orang)		150	150	150	150	150							
	- Jumlah Pembina Industri yang memiliki sertifikat kompetensi (SI & EKIN) (orang)		420	450	480	500	500							
	- Jumlah guru dan dosen yang memiliki sertifikasi (orang)		60	80	100	130	200							
	- Jumlah pembina industri yang mengikuti rintisan gelar (orang)		200	230	250	250	250							
	- Jumlah Tenaga Kerja lulusan pelatihan berbasis kompetensi (diklat 3 in 1) (orang)		5.000	10.000	15.000	15.000	15.000							
	- Jumlah Konsultan Industri yang memiliki sertifikat kompetensi (orang)		50	50	50	50	50							
	- Jumlah Wirausaha industri yang memiliki sertifikat kompetensi melalui TPL (orang)		120	120	120	120	120							
	- Jumlah wirausaha industri yang memiliki sertifikat kompetensi melalui Diklat Kewirausahaan (orang)		100	100	100	100	100							
	- Jumlah tenaga kerja lulusan Pendidikan Kejuruan Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi (orang)		1.490	1.490	1.490	1.490	1.490							
	- Jumlah tenaga kerja lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi (orang)		2.050	2.050	2.050	2.050	2.050							
	- Jumlah tenaga kerja lulusan pendidikan D1 & D2 yang lulusannya langsung diserap di industri (orang)		480	480	480	480	480							
	Tersedianya Unit pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi (unit)		13	19	12	7	7	154.000,0	285.000,0	245.000,0	225.000,0	225.000,0		
	- Jumlah Prodi yang berbasis kompetensi (Unit prodi)		10	10	9	4	4							
	- Jumlah lembaga pelatihan yang berbasis kompetensi (Unit)		2	7	1	1	1							
	- Pendirian lembaga pendidikan dan pelatihan industri yang berbasis kompetensi di WPPI (Unit)		1	2	2	2	2							
	Tersusunnya laporan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai (Laporan)		1	1	1	1	1	136.709,0	157.215,4	180.797,7	207.917,3	239.104,9		
	- Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai di lingkungan Pusdiklat, Unit Pendidikan dan Balai Diklat dengan tepat waktu (Bulan Layanan)		12	12	12	12	12							
Pembangunan Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi dan Handal								31.296,3	34.200,1	37.639,1	40.540,6	46.450,2	Pusat Data dan Informasi	
	Data Base dan Data Warehouse yang Mutakhir (Jenis)		-	4	4	4	4	10.204,5	11.711,3	14.762,4	17.303,7	20.494,1		
	- Tersedianya data dan informasi bidang industri		-	4	4	4	4							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Rp Juta)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Analisis Data Industri (Jenis data)		4	4	4	4	4	1.153,4	1.268,8	1.395,7	1.535,2	1.688,7		
	- Tersedianya analisa data industri		4	4	4	4	4							
	Penyajian Data Industri (Jenis sajian)		2	2	2	2	2	805,6	910,2	1.001,3	490,5	539,5		
	- Tersajinya informasi industri secara elektronik dan non elektronik		2	2	2	2	2							
	Aplikasi e-Government (jenis aplikasi)		5	13	16	21	26	673,7	1.460,0	1.135,0	1.085,0	1.295,0		
	- Meningkatnya efisiensi terkait pelayanan publik (%)		20	25	30	35	40							
	- Meningkatnya efisiensi dalam operasional perkantoran (%)		30	35	40	45	50							
	Sistem Jaringan yang Handal (unit)		1	1	1	1	1	4.363,2	3.650,0	2.680,0	2.260,0	1.840,0		
	- Rata-rata up-time data center dalam setahun (%)		95	98	98	98	98							
	Layanan Kepegawaian (orang)			48	48	48	48	652,1	717,3	789,0	867,9	954,7		
	- Indeks Kepuasan Pegawai (skala 5)			4	4,1	4,2	4,3							
	Layanan Penganggaran dan Administrasi Keuangan (Laporan)			6	6	6	6	807,4	888,2	977,0	1.074,7	1.182,1		
	- Ketersediaan Dokumen Anggaran (Dokumen)			1	1	1	1							
	- Deviasi antara Target dan Rencana Anggaran (%)			5	5	5	5							
	- Laporan Pelaksanaan Verifikasi Transaksi Keuangan (Laporan)			1	1	1	1							
	- Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan (%)			95	95	95	95							
	Layanan Ketatalaksanaan			3	3	3	3	1.814,0	1.743,0	1.907,3	1.680,5	2.838,5		
	- Jumlah Norma yang dikelola (Norma)			3	3	3	3							
	- Meningkatnya kualitas tata kelola TIK (%)			60	70	75	80							
	Layanan Umum (Laporan)			2	2	2	2	1.897,9	2.034,4	2.192,9	2.364,7	2.551,1		
	- Indeks Kepuasan Pegawai (skala 5)			4	4,1	4,2	4,3							
	- Tingkat kepuasan stakeholder LPSE (%)		70	75	80	85	90							
	Layanan Perkantoran (bulan)		12	12	12	12	12	8.924,5	9.816,9	10.798,6	11.878,5	13.066,3		
	- Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Pegawai Tepat Waktu (Bulan)		12	12	12	12	12							
	- Terselenggaranya Operasional Perkantoran (Bulan)		12	12	12	12	12							
Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Komunikasi dan Informasi Publik								29.541,7	32.495,8	35.745,4	39.319,9	43.251,9	Pusat Komunikasi Publik	
	Terselenggaranya Layanan Publik Kementerian Perindustrian (Jenis Layanan)		3	3	3	3	3	4.174,7	4.592,2	5.051,4	5.556,5	6.112,2		
	- Indeks Kepuasan Masyarakat (skala 4)		3,1	3,2	3,3	3,4	3,5							
	Terselenggaranya Layanan Kehumasan Kementerian Perindustrian (Jenis Layanan)		3	3	3	3	3	16.148,4	17.763,2	19.539,6	21.493,5	23.642,9		
	- Persentase Pemberitaan Negatif Sektor Industri		10	9	8	7	6							
	- Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Promosi Produk Dalam Negeri		70	72	74	76	80							
	- Tingkat Kualitas Fasilitas Hubungan Antar Lembaga		70	72	74	76	80							
	Layanan perkantoran (bulan layanan)		12	12	12	12	12	9.218,6	10.140,4	11.154,5	12.269,9	13.496,9		
	- Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai di lingkungan Setjen dengan tepat waktu (bulan layanan)													
	- Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran													
	- Tersusunnya Standar Kompetensi untuk Sumber Daya Manusia													
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN								20.305,3	21.726,7	23.247,5	24.874,8	26.616,1	Sekretariat Jenderal	
	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian (Jenis)		5	6	6	7	7							
	- Tingkat kepuasan stakeholders pusat dan daerah (Persentase)		80	81	82	83	84							
Pembangunan, pengadaan, perbaikan, dan peningkatan sarana dan prasarana kerja								20.305,3	21.726,7	23.247,5	24.874,8	26.616,1	Biro Umum	
	Peningkatan sarana dan prasarana satker pusat dan daerah (daerah)		3	3	4	4	5	20.305,3	21.726,7	23.247,5	24.874,8	26.616,1		
	- Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana (%)		90	90	90	90	90							



SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53, Jakarta 12950
T : (021) 5255509
F : (021) 5250906
W: www.kemenperin.go.id